

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Kualitas tersebut ditandai oleh terbangunnya suatu kondisi masyarakat yang memiliki pendapatan lebih tinggi, pendidikan lebih baik, standar kesehatan meningkat, kemiskinan teratasi, dan kondisi lingkungan hidup yang futuristik.

Atas dasar hal tersebut, pembangunan dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai upaya melakukan perubahan mendasar. Perubahan itu meliputi struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi Pemerintah dalam melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Pembangunan di Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta, dan seluruh rakyat dengan berbagai dinamika sosial, ekonomi dan politik yang berkembang. Krisis ekonomi pada Tahun 1997 yang selanjutnya berkembang menjadi krisis multidimensi mengakibatkan pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada konsep perencanaan jangka panjang mengalami stagnasi. Hal ini berlangsung pula di Kabupaten Ciamis, sehingga pembangunan selama ini lebih difokuskan pada berbagai upaya mengatasi krisis tersebut. Pembangunan pasca krisis multidimensi dan pasca reformasi dengan tanpa didasari konsep pembangunan jangka panjang menyebabkan suatu inkonsistensi pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan terjadinya perubahan dalam tata Pemerintahan Daerah, dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan terakhir disesuaikan kembali dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Pemerintah Daerah menjadi daerah otonom, sangat mewarnai perjalanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, lahir pula Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Ciamis sangat memengaruhi kondisi Pemerintahan, kewilayahan, dan aspek lainnya. Nuansa otonomi daerah telah membawa semangat bagi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kemandirian serta kemampuan berkompetisi antar-daerah untuk bersama-sama mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kabupaten Ciamis menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yaitu dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. RPJPD sebagai tujuan daerah ini disusun dalam bentuk Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dibagi ke dalam lima tahapan pembangunan, yaitu Tahun 2005-2009, Tahun 2009-2014, Tahun 2014-2019, Tahun 2019-2024 dan Tahun 2024-2025 sebagai pendukung tujuan pembangunan regional Jawa Barat dan Nasional.

Periode Tahun 2005-2009, sebagai bagian RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, kebijakan pembangunannya telah terformulasi dalam Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2008. Pada tahapan ini termuat Visi : "Dengan Iman dan Taqwa Ciamis terdepan dalam Agribisnis dan Pariwisata di Priangan Tahun 2009", dengan memfokuskan kepada dua *core bisnis* andalan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk menjalankan pembangunan pada periode selanjutnya, Kabupaten Ciamis melakukan analisis dan kaji ulang tentang Renstra Tahun 2004 - 2009 agar implementasinya sesuai dengan RPJPD Kabupaten Ciamis 2005 - 2025.

1.2 Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJPD yang merupakan rencana pembangunan sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 bersifat makro yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk waktu 5 (lima) tahunan, sesuai dengan periode masa jabatan Bupati, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

RPJPD Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025. RPJPD ini merupakan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat mengenai arah pembangunan selama periode 20 tahun dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen, baik pemerintah maupun masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis adalah:

1. Menetapkan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang disepakati bersama, sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah, Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan pada tingkat nasional dan provinsi dengan perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJPD Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerUndang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17).

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025 mencakup aspek pembangunan di segala bidang kehidupan untuk jangka waktu 20 tahun.

Adapun sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, landasan hukum, sistematika penulisan, dan alur pikir.

BAB II KONDISI UMUM DAN TANTANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Bab ini membahas tentang penjelasan umum mengenai kondisi pada saat awal penyusunan RPJPD di setiap bidang pembangunan, analisis terhadap tantangan yang akan dihadapi, dan modal dasar pembangunan.

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Bab ini membahas tentang visi dan misi pembangunan Kabupaten Ciamis serta maknanya.

BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005-2025

Bab ini membahas tentang arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis. Arah pembangunan merupakan refleksi pelaksanaan misi, sedangkan implementasi dari arah pembangunan tersebut diwujudkan dalam tahapan prioritas pembangunan.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan RPJPD Kabupaten Ciamis yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama Tahun 2005-2025.

1.6. Pola Pikir dan Proses Penyusunan

1.6.1 Pola Pikir Penyusunan

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berorientasi pada pencapaian arah dan tujuan pembangunan yang berkesinambungan, sistematis, dan menyeluruh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi empiris telah mendorong kepentingan penyusunan RPJPD tersebut karena adanya kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Daerah untuk memiliki orientasi pembangunan jangka panjang daerah dengan arah dan tujuan pembangunan yang jelas.

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis 2005–2025 didasarkan pada pola pikir yang meliputi: Kebijakan Pembangunan Nasional; Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat; identifikasi dan proyeksi kondisi, masalah, peluang, dan tantangan pembangunan daerah; partisipasi masyarakat; visi dan misi pembangunan jangka panjang; serta arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah. Keenam substansi tersebut merupakan pola pikir yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis 2005–2025.

Kebijakan pembangunan jangka panjang nasional yang diwujudkan dalam Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat dalam pergaulan masyarakat internasional.

Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dijadikan acuan dalam menyusun visi misi dan program pembangunan untuk penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD Propinsi Jawa Barat serta dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJPD, RPJM, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu antara pembangunan tingkat nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota.

Identifikasi dan proyeksi kondisi, masalah, peluang, dan tantangan pembangunan daerah merupakan tahap awal penyusunan RPJPD. Langkah ini merupakan bentuk pemindaian (*scanning*) lingkungan, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kondisi berbagai aspek pembangunan. Hasil dari langkah ini merupakan dasar dalam merancang Visi dan Misi serta Arah dan Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian utama yang ditempuh dalam mengeksplorasi, membangun, dan membulatkan rancangan visi, misi, dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah ini. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kegiatan konsultasi publik dilakukan urun rembuk untuk memperoleh informasi mengenai pandangan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat yang kemudian disintesis dengan teknokratis-akademis terutama dalam tahap mengidentifikasi dan memproyeksi kondisi, yang selanjutnya dikukuhkan melalui proses politis menjadi suatu kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dari proses tersebut, terwujudlah suatu rumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang holistik, terpadu, dan sinergis antara realitas objektif dengan realitas kebutuhan dan harapan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Ciamis.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang merupakan esensi dari RPJPD Kabupaten Ciamis yang dihasilkan dari rangkaian proses partisipasi masyarakat. Visi dan misi ini merupakan perwujudan hakikat kehendak masyarakat Kabupaten Ciamis, yang akan dibangun 20 tahun yang akan datang dengan memerhatikan kondisi dan potensi yang ada. Visi dan Misi ini akan menjadi sumber fundamental dalam menentukan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Arah Pembangunan Jangka Panjang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Arah pembangunan ini memberikan gambaran mengenai langkah-langkah pembangunan umum bersifat arahan (indikatif) yang harus dilakukan selama 20 tahun ke depan. Rumusan kebijakan pembangunan yang bersifat lebih operasional (imperatif) dalam kurun waktu yang lebih pendek, yaitu lima tahunan (jangka menengah) dan satu tahunan (jangka pendek) harus mengacu secara konsisten terhadap Arah dan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang.

Keenam substansi tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan dalam membentuk sistem secara holistik dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025. Kristalisasi makna yang terwujud dari interaksi seluruh substansi tersebut adalah bahwa RPJPD Kabupaten Ciamis 2005–2025 merupakan pernyataan kehendak masyarakat Kabupaten Ciamis yang harus terbangun 20 tahun mendatang yang dijabarkan ke dalam bentuk Visi, Misi, Arah, dan Kebijakan Pembangunan yang jelas sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat.

1.6.2 Proses Penyusunan

Penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis dilakukan melalui serangkaian langkah yang meliputi proses partisipatif, *bottom up dan top down planning*, teknokratis, dan politis. Secara umum tahapan yang ditempuh dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan berbagai langkah teknis dan koordinatif untuk menyusun prakondisi yang memadai bagi pelaksanaan penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis. Langkah-langkah tersebut meliputi: *pertama*, menyusun Rancangan Awal RPJPD melalui kegiatan pengumpulan data, analisis data, dan penjaringan aspirasi masyarakat dalam menentukan visi dan misi RPJPD (Tahun 2006); *kedua*, melaksanakan Dialog Interaktif (Tahun 2007) melalui kegiatan perumusan visi dan misi serta penentuan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan; dan *ketiga*, menyusun rancangan RPJPD melalui kegiatan pembahasan dengan kelompok kerja yang beranggotakan unsur perguruan tinggi, SKPD, lembaga kemasyarakatan dengan agenda memantapkan rancangan awal RPJPD, dan sosialisasi Rancangan RPJPD melalui media massa cetak dan elektronik sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang.

2. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD Kabupaten Ciamis 2005-2025.

Pada tahap ini dimaksudkan untuk memantapkan Rancangan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025. Langkah yang ditempuh antara lain menyusun agenda kegiatan, panduan kegiatan musrenbang, penggandaan ringkasan, penyebaran undangan, penyiapan tempat dan fasilitas peserta. Bahan yang dijadikan sebagai dasar kesepakatan adalah Rancangan Awal RPJPD yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya. Unsur masyarakat yang diundang dalam Musrenbang ini bersifat menyeluruh, yang meliputi Unsur Organisasi Masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Kesepakatan yang terbangun dalam tahap ini menjadi bahan untuk penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.

Pada tahap ini dilakukan kegiatan penyusunan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penyusunan naskah akademik RPJPD, penyampaian naskah rancangan kepada Bupati dan berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

4. Penetapan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025

Pada tahap ini merupakan proses penetapan produk hukum RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 agar dapat digunakan sebagai acuan pembangunan selama periode tersebut. Langkah pokok yang ditempuh adalah melakukan sosialisasi, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Ciamis 2005-2025 oleh Bupati kepada DPRD, Pembahasan Raperda RPJPD, dan Penetapan Perda RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025.

BAB II

KONDISI UMUM DAN TANTANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Kabupaten Ciamis merupakan kabupaten di bagian Tenggara Wilayah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai luas wilayah 248.763 Ha. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Kabupaten Ciamis berada pada 108°20' sampai dengan 108°40' Bujur Timur dan 7°40'20" sampai dengan 7°41'20" Lintang Selatan. Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, sebelah Barat dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, sebelah Timur dengan Kota Banjar dan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah Selatan dengan Samudera Hindia yang mempunyai panjang garis pantai 91 Km dan luas wilayah laut 67.340 Ha berada di enam kecamatan.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pelaksanaan pembangunan di daerah telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, meliputi bidang kependudukan; sosial budaya; perekonomian; infrastruktur wilayah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan tata ruang; serta pemerintahan. Selain telah banyak kemajuan yang dicapai, masih terdapat pula masalah yang belum terpecahkan dan memerlukan berbagai upaya dalam mengatasi pembangunan jangka panjang daerah 20 tahunan.

2.1 KONDISI PADA SAAT INI

2.1.1 BIDANG KEPENDUDUKAN, AGAMA, DAN SOSIAL BUDAYA

1. Bidang Kependudukan

Berdasarkan registrasi penduduk sampai dengan akhir Desember 2005 Kabupaten Ciamis memiliki penduduk sebanyak 1.457.146 orang, yang terdiri atas 721.881 orang laki-laki dan 735.265 orang perempuan. Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir (1996-2005) rata-rata laju pertumbuhan penduduk 0,21 %. Pertumbuhan penduduk pada umumnya disebabkan oleh jumlah kelahiran yang relatif lebih besar dibandingkan dengan *migrasi netto* dan kematian.

Jumlah kelahiran hidup pada Tahun 2005 sebanyak 11.675 orang dan angka kematian sebanyak 7.631 orang. Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir rata-rata kelahiran setiap tahunnya 10.697 orang, kematian 7.951 orang, penduduk pendatang sebanyak 4.760 orang dan penduduk keluar 5.364 orang. Dengan demikian rata-rata pertambahan penduduk setiap tahun sebanyak 2.142 orang.

Pada periode tahun 1996-2005 secara umumnya jumlah angka kelahiran terus meningkat dan juga jumlah penduduk yang keluar dari Kabupaten Ciamis menunjukkan angka peningkatan. Kondisi ini mengakibatkan penduduk usia produktif mengalami penurunan jumlahnya, sehingga jumlah penduduk yang berusia antara 0-14 tahun lebih dominan jika dibandingkan dengan penduduk yang berusia di atasnya. Keterbatasan lapangan pekerjaan serta keinginan untuk melanjutkan sekolah menjadi salah satu pilihan untuk keluar dari Kabupaten Ciamis yang mencapai rata-rata 604 orang per tahun.

Kepadatan penduduk Kabupaten Ciamis pada Tahun 2005 adalah 586 orang per Km² dan relatif tidak berubah jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk pada Tahun 1996. Berdasarkan sebaran penduduk diketahui sebesar 5,67 % bertempat tinggal di Kecamatan Ciamis dengan tingkat kepadatan penduduk 2.505 orang per Km². Kepadatan penduduk yang cukup tinggi juga terdapat di Kecamatan Cikoneng, Cihaurbeuti, Kawali, Lumbung, Sindangkasih, dan Baregbeg dengan rata-rata kepadatan di atas 1.000 orang per Km².

Berdasarkan kelompok usia, penduduk Kabupaten Ciamis didominasi oleh kelompok umur usia muda. Pada Tahun 2005 terdapat penduduk kelompok usia 5-9 tahun sebesar 8,85 %, 10-14 tahun sebesar 8,88 % dan 15-49 tahun sebesar 54,39 %. Kenyataan seperti ini harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.

2. Bidang Agama

Komposisi penduduk Kabupaten Ciamis berdasarkan agama yang dianut sampai dengan Tahun 2005, diketahui bahwa penduduk beragama Islam sebesar 99,88 %, Katolik 0,064%, Kristen 0,048%, Budha 0,002 %, dan Hindu 0,005 %.

Pembangunan bidang agama di Kabupaten Ciamis ditandai dengan penambahan sarana dan prasarana kegiatan beragama seperti mesjid, mushola, langgar, Majelis Taklim, serta penyelenggaraan pendidikan agama baik formal maupun informal. Jumlah tempat peribadatan sampai dengan 2005 sebanyak 3.653 mesjid, 1.114 mushola, 6.191 langgar dan 16 gereja. Pembangunan sarana pendidikan formal agama Islam tercatat sebanyak 213 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 119 Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 38 Madrasah Aliyah (MA) serta 565 pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 40.751 orang. Perkembangan pendidikan tinggi agama sampai dengan Tahun 2005 terdapat 2 (dua) perguruan tinggi yang berbasis agama Islam.

Perkembangan pendidikan agama, khususnya pendidikan Agama Islam yang didukung oleh 2.016 ulama, 2.141 mubaligh, 5.546 khotib dan penyuluh agama 34 orang. Indikator lain yang berkaitan dengan pembangunan agama antara lain terjadi peningkatan jumlah jemaah haji sebesar 10,06 %, terjadi rata-rata peningkatan hasil zakat fitrah sebesar 7 % dan pada Tahun 2005 jumlah penerimaan zakat fitrah sebesar Rp. 7.003.404.212,- yang berasal dari 400.084 KK (1.388.673 jiwa).

3. Bidang Sosial Budaya

a. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan ditentukan oleh pencapaian Indeks Pendidikan yang ditentukan oleh Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada Tahun 2003 di Kabupaten Ciamis pencapaian RLS sebesar 6,5 tahun, Tahun 2005 sebesar 6,70 tahun. Angka Melek Huruf (AMH) pada Tahun 1998 sebesar 93,01 % dan pada Tahun 2005 mengalami kenaikan menjadi 96,10 %. Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) masyarakat Kabupaten Ciamis terhadap pendidikan SD/MI pada Tahun 1994/1995 sebesar 56,16 %, Tahun 2000 sebesar 87, 64 %, dan Tahun 2005 sebesar 94,40 %; APM tingkat SMP/MTs pada Tahun 1994/1995 sebesar 57,27 % dan Tahun 2005 sebesar 75,50%; APM tingkat SMA/SMK/MA pada Tahun 1994/1995 sebesar 56,43 %, dan Tahun 2005 sebesar 40,77 %.

Perkembangan jumlah sekolah berdasarkan tingkatan pendidikan selama 10 tahun terakhir (1996-2005) mengalami peningkatan kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak sampai dengan bulan Desember 2005 sebanyak 325 sekolah dengan jumlah guru 777 orang; Sekolah Dasar/MI/Madrasah Diniyah sebanyak 2.798 sekolah dengan jumlah guru 15.054 orang; Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs sebanyak 215 Sekolah dan hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Ciamis sudah ada sekolah setingkat SMP/MTs dengan jumlah guru 3.106 orang; Sekolah Menengah Umum (SMU)/MA sebanyak 59 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 1.212 orang, namun dengan sebaran yang belum merata di setiap kecamatan; Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 23 Sekolah dengan jumlah guru 632 orang; dan 4 (empat) Perguruan Tinggi yang antara lain Universitas Galuh (Unigal), Institut Agama Islam Darussalam (IAID), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhamadiyah, dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Putra Galuh.

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun belum dapat dicapai. Kondisi ini ditandai dengan masih adanya siswa putus sekolah (*Drop Out*) dan Rawan DO (RDO), masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan; kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan apresiasi terhadap pendidikan non-formal masih kurang; serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) belum mampu memberdayakan diri.

Walaupun demikian, kualitas pendidikan di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan yang diukur berdasarkan peningkatan jumlah Angka Melek Huruf (AMH) dan peningkatan RLS pada penduduk usia 15 tahun ke atas, yang ditopang oleh peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk semua kelompok usia.

Dalam rangka mendukung pendidikan formal dan informal di Kabupaten Ciamis, disiapkan tenaga pengajar dan fasilitator bidang rumpun pendidikan TK, Dasar, Sekolah Lanjutan dan khusus. Pada Tahun 2005 terdapat tenaga kependidikan dalam jabatan penilik Pendidikan Luar Sekolah sebanyak 110 orang; pengawas mata pelajaran sebanyak 22 orang; pamong belajar yang bertugas di SKB sebanyak 13 orang; tenaga guru SD/MI sebanyak 8.900 orang; guru SLTP/Mts sebanyak 3.106 orang; guru SLTA/MA sebanyak 1.844 orang; dan dosen pada Perguruan Tinggi sebanyak 776 orang.

b. Kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang kesehatan ditentukan oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) serta Angka Kematian Ibu (AKI). Dalam meningkatkan Indeks Kesehatan di Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan sumber daya kesehatan; keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan; peningkatan promosi kesehatan masyarakat; pencegahan dan pemberantasan penyakit; pembinaan kesehatan lingkungan; serta penyediaan dan pengawasan obat, alat kesehatan, dan makanan minuman.

Berdasarkan data Tahun 1998 Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 56 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan pada Tahun 2006 mencapai 42,44 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi mengalami penurunan. Sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Ciamis pada Tahun 1998 adalah 65,40 tahun, mengalami peningkatan pada Tahun 2005 menjadi 65,91 tahun.

Upaya meningkatkan indeks kesehatan masyarakat di Kabupaten Ciamis didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumberdaya kesehatan, meliputi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Swasta, 51 Puskesmas, 110 Puskesmas Pembantu serta 41 puskesmas keliling. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga medis 89 orang, tenaga kefarmasian 27 orang, tenaga gizi 39 orang, tenaga keperawatan 520 orang, bidan 395 orang, tenaga kesehatan masyarakat 12 orang, tenaga sanitasi berpendidikan sarjana sebanyak 21 orang dan berpendidikan diploma sebanyak 34 orang, tenaga teknis medis 99 orang, dan tenaga kesehatan non medis 274 orang. Untuk melaksanakan program pengendalian jumlah penduduk didukung oleh tenaga penyuluh KB sebanyak 139 orang.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat merupakan prioritas utama pembangunan di Kabupaten Ciamis, dengan fokus kegiatan pada upaya menciptakan dan mendorong seluruh keluarga menjadi keluarga yang berdaya. Hal ini ditandai dengan beban hidup tidak terlalu berat, ekonomi kuat, dan ketahanan masyarakat mantap. Prinsip dasar kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui konsep 5K, yaitu Kahayang, Kanyaho, Kabisa, Kadaek, tur Kaboga (Masyarakat yang berkeinginan, berpengetahuan, berkemampuan, berkemauan dan berkepemilikan untuk membangun dirinya).

Taraf kesejahteraan sosial masyarakat semakin meningkat sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Program Pemberdayaan Perempuan semakin mengalami

perkembangan yang pesat dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bagi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wujud pemberdayaan ini dengan telah dibentuk Forum Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi Gender dengan tujuan melaksanakan koordinasi layanan, konsultasi dan fasilitasi di bidang kesetaraan dan keadilan gender, tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan dengan Dinas/Badan/Lembaga terkait, PT, LSM yang mempunyai minat terhadap pemberdayaan gender. Adapun perkembangan kondisi pemberdayaan perempuan untuk Tahun 2005 dalam kegiatan P2WKSS terbentuk sebanyak 200 KK Binaan, UP2K sebanyak 1.252 kelompok dan terbentuk Kader Khusus TP-PKK sebanyak 15.364 orang, Organisasi Perempuan sebanyak 43 unit, dan perempuan yang menduduki jabatan di legislatif sebanyak 2 orang.

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana merupakan upaya pengendalian laju penduduk melalui penurunan angka kelahiran serta menciptakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Salah satu aspek yang penting adalah pembinaan ketahanan keluarga serta pembinaan kesejahteraan keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang diarahkan pada peningkatan jumlah tahapan keluarga sejahtera.

Sejak Tahun 2003, angka kesertaan ber-KB khususnya peserta KB aktif mengalami kenaikan dari 73,39 % menjadi 74,86 % pada Tahun 2005. Demikian pula pencapaian peserta KB baru untuk Tahun 2005 tercapai sebesar 104,39 %. Jumlah pengelola KB, khususnya pada institusi perdesaan, yaitu Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) mencapai 360 orang, sub pos KB desa sebanyak 4.141 orang, serta kelompok akseptor sebanyak 11.979 orang.

Program-program yang dilaksanakan yaitu program pelayanan peserta KB baru, pembinaan peserta KB aktif, peningkatan peran pria dalam ber KB, pelayanan ayoman KB, sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) HIV AIDS. Dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga perlu diarahkan dan diperkuat program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS dan sampai saat ini berjumlah 446 kelompok.

d. Kesejahteraan Sosial

Penanganan kesejahteraan sosial masih belum optimal dalam mengatasi kemiskinan dan keluarga Pra Kesejahteraan Sosial (Pra KS), keterlantaran, penyandang cacat, serta penyimpangan perilaku. Kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini berorientasi pada pelayanan, rehabilitasi dan manajemen pelayanan sosial. Bentuk-bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan penanganan kesejahteraan sosial melalui pembinaan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat serta pengembangan kegiatan kepedulian sosial terhadap penduduk lanjut usia, penyandang cacat, tuna susila dan anak jalanan serta bayi dan anak terlantar.

Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial terbentuk organisasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di Kabupaten Ciamis terdapat 35 organisasi sosial/yayasan, 341 karang taruna dan 365 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 500 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM). Selain itu, serta telah terbangun sarana penyantunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 3 buah terdiri atas 1 LBK, 2 BPSA dan 1 buah PSBK.

Saat ini tercatat data penduduk miskin sebanyak 114.102 orang, jumlah anak terlantar dan anak jalanan sebanyak 145 orang, serta kemungkinan terjadi penyimpangan perilaku dalam bentuk kriminalitas, kecenderungan meningkatnya permasalahan sosial seperti kenakalan remaja, kekerasan, narkoba, dan dugaan HIV-AIDS yang mencapai 2 kasus pada Tahun 2005 terutama di daerah objek wisata.

Meskipun garis kemiskinan naik, tetapi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis turun dari 228.900 orang (15,18%) pada Tahun 2003 menjadi sebanyak 221,9 ribu orang (14,73%) pada Tahun 2004. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan kenaikan tingkat pendapatan penduduk yang dapat memenuhi kebutuhan standar hidup dan berada di atas garis kemiskinan.

Pada umumnya karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2004 ditandai dengan partisipasi sekolah rendah, melek huruf dan berpendidikan rendah, tidak bekerja tetap atau bermata-pencaharian tidak tetap. Dari aspek kesehatan, ditandai dengan persalinan balita tidak menggunakan jasa kesehatan. Selanjutnya, dari aspek fasilitas perumahan ditandai dengan rumah berlantai tanah, air minum bukan dari air bersih, (air kemasan, ledeng atau sumur terlindung), dan tidak memiliki jamban keluarga. Sedangkan berdasarkan data Susenas, batas garis kemiskinan Kabupaten Ciamis pada Tahun 2003 adalah sebesar Rp. 120.798,- per kapita per bulan, sedangkan pada Tahun 2004 sebesar Rp. 123.217,- per kapita per bulan.

e. Budaya

Kegiatan pembangunan di bidang budaya ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya lokal di Kabupaten Ciamis. Pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah dilakukan dengan bersumber pada nilai-nilai warisan leluhur yang sesuai dengan agama, moral, etika, dan estetika. Selain itu, pengembangan budaya dilakukan melalui pemeliharaan dan pelestarian situs budaya sebagai wahana pendidikan, penelitian, dan pariwisata. Nilai-nilai budaya yang masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Ciamis adalah budaya primordial yang masih kuat.

Dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya kegiatan berkomunikasi digunakan bahasa ibu, yaitu basa Sunda. Di sebagian wilayah Kabupaten Ciamis terdapat penduduk yang menggunakan bahasa Jawa. Komunikasi yang dilakukan mereka menggunakan bahasa campuran, antara basa Sunda dan bahasa Jawa dialek Banyumasan. Letak geografis dan geokultur Kabupaten Ciamis memunculkan basa Sunda dialek Ciamisan. Akan tetapi dalam kegiatan belajar mengajar digunakan media komunikasi bahasa Indonesia. Bahasa Sunda dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal pada tingkatan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Kesenian tradisional yang masih hidup di masyarakat adalah kesenian ronggeng gunung/ronggeng amen dan beluk. Pada umumnya masyarakat Ciamis masih mempertahankan budaya lisan, sehingga berkembang folklore dan legenda yang berhubungan dengan suatu daerah. Dalam hal strata sosial yang menunjukkan perbedaan antara keturunan ningrat dengan masyarakat biasa tidak lagi berkembang di masyarakat.

2.1.2 PEREKONOMIAN DAERAH

1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur indikator makro ekonomi. Perkembangan PDRB Kabupaten Ciamis selama sepuluh tahun terakhir adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan harga konstan tahun dasar 1993, PDRB Kabupaten Ciamis pada Tahun 1996 mengalami pertumbuhan sebesar 6,76 % dan Tahun 1997 mencapai 3,68 %, sedangkan pada Tahun 1998 PDRB Kabupaten Ciamis mengalami pertumbuhan negatif sebesar 9,63 % sebagai akibat krisis ekonomi nasional. Pada Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2005 PDRB kembali mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,51 % per tahun. Pada kurun waktu tahun 1996-2005 terjadi inflasi tertinggi pada tahun 1998.

Selanjutnya, antara tahun 2002-2005 laju inflasi terus mengalami kenaikan dengan inflasi rata-rata per tahun sebesar 11,57 %.

PDRB Perkapita menunjukkan kondisi yang tumbuh lebih baik, yaitu rata-rata naik 20,10 % setiap tahun, walaupun pada tahun 1998 dan tahun 2001 mengalami penurunan. Kondisi PDRB Perkapita Tahun 2005 sebesar Rp. 5.766.445.16 atau mengalami kenaikan sebesar 180,91%, jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Tahun 1996.

- b. Pada Tahun 1995 sumbangan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis menurut lapangan usaha didominasi oleh tiga lapangan usaha, yaitu pertanian sebesar 35,72 %; perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 21,85 %; dan jasa sebesar 11,83 %. Selama kurun waktu 1995 - 2005 diketahui sumbangan ketiga sektor di atas masih tetap dominan, dan terlihat terjadi *trend* pergeseran dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Pada Tahun 2005 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 28,94 % (turun 6,78 %); perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 24,56 % (naik 2,71 %); dan jasa-jasa sebesar 11,20 % (turun 0,60 %).

2. Bidang Pertanian

Dalam perkembangan perekonomian Kabupaten Ciamis, bidang pertanian masih menjadi sektor andalan dalam pembangunan daerah karena selain merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk, juga memberikan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kabupaten Ciamis, yaitu rata-rata sebesar 29,93 % selama periode 1996 - 2005. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian (petani, buruh tani, peternak, perikanan) sampai dengan akhir Tahun 2005 sebanyak 565.772 orang. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 1996 sebanyak 576.108 orang.

Kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 10 tahun didukung oleh luas areal lahan pertanian. Luas lahan sawah sebesar 51.644,22 Ha atau 20,76 % dari luas wilayah Kabupaten Ciamis, tanah kering sebesar 197.117,77 Ha atau 79,24 % dari luas wilayah Kabupaten Ciamis. Panjang pantai yang dimiliki adalah sepanjang 91 Km dengan luas wilayah laut sebesar 67,340 Ha yang berada di 6 kecamatan.

Komposisi luas tanah sawah di Kabupaten Ciamis selama sepuluh tahun terakhir mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 1996. Penggunaan tanah kering mengalami perubahan, terutama terjadi peningkatan penggunaan untuk bangunan dan halaman rumah. Secara umum rata-rata kepemilikan lahan relatif sempit yaitu per kepala keluarga (KK) sekitar 0,53 Ha/KK yang merupakan jumlah komulatif kepemilikan tanah sawah dan lahan kering.

Produktivitas lahan pertanian rata-rata belum optimal, baik dilihat dari kualitas tanaman maupun produktivitas hasil panen. Hal ini terlihat dari hasil produksi pertanian selama sepuluh tahun terakhir (1996-2005) dari tiga komoditas unggulan: padi sawah, jagung, dan kedelai yang masih relatif rendah dan fluktuatif. Demikian pula komoditas tanaman pangan lain menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam budidaya pertanian masih belum memadai.

Produktivitas tanaman padi sawah pada Tahun 1996 mencapai 5,52 Ton/Ha dan tanaman padi ladang sebesar 2,76 Ton/Ha. Pada Tahun 2005 produktivitas padi sawah sebesar 5,48 Ton/Ha dan padi ladang sebesar 2,43 Ton/Ha. Data di atas menunjukkan bahwa produktivitas tanaman padi selama 10 tahun mengalami penurunan, demikian pula dengan komoditas palawija terutama tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau juga mengalami penurunan sebesar 62,73%.

Komoditas buah-buahan yang dikembangkan di Kabupaten Ciamis terdapat 22 komoditas, namun yang merupakan komoditas unggulan hanya tiga komoditas yaitu: pisang, rambutan dan duku. Dari tiga komoditas unggulan tersebut, pada Tahun 2005

produktivitas pisang mencapai 16,93 Kw/Ha, rambutan 10,04 Kw/Ha) dan duku 15,09 ton/Ha. Produktivitas tertinggi komoditas pisang terjadi pada Tahun 1999 mencapai 17,93 kw/Ha, komoditas rambutan produktivitas tertinggi pada Tahun 2004 mencapai 10,80 kw/Ha, dan produktivitas tanaman duku tertinggi terjadi pada Tahun 1998 mencapai 16,85 kw/Ha. Secara umum tingkat produktivitas tanaman buah-buahan, khususnya untuk tiga komoditas unggulan mengalami penurunan jumlahnya.

Komoditas sayuran yang menjadi unggulan Kabupaten Ciamis adalah cabe merah. Dari Tahun 1996 sampai 2005 rata-rata perkembangan produksi komoditas ini mengalami penurunan, sedangkan luas lahan panen mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Komoditas perkebunan rakyat yang menjadi unggulan Kabupaten Ciamis adalah kelapa, kakao dan teh. Produksi kelapa dalam sepuluh tahun terakhir terus berfluktuasi meskipun luas areal tanaman kelapa relatif tetap. Luas produksi kakao dari Tahun 1996 sampai 2001 perkembangan relatif berfluktuasi, namun pada Tahun 2002 sampai dengan 2005 produksi kakao mengalami peningkatan seiring dengan pemeliharaan dan harga yang semakin baik. Sedangkan komoditas perkebunan besar baik swasta maupun pemerintah adalah tanaman karet dengan luas tanam 2.628,317 Ha dan tingkat produktivitas 0,56 ton per Ha, tanaman kakao seluas 1.190 Ha dengan produktivitas 0,14 ton biji kering per Ha.

Komoditas unggulan sektor peternakan adalah ayam ras dan sapi potong. Populasi ayam ras di Kabupaten Ciamis pada Tahun 1996-2005 mengalami peningkatan sebesar 42,43 %. Produksi daging dan susu pun mengalami peningkatan produksi. Sejak Tahun 1996-2005 terdapat kenaikan produksi daging unggas, yang mencapai 922,24 % dan produksi telur mengalami penurunan dan hanya mencapai 18,23 %. Kasus Avian Influenza (AI) pada unggas tidak mengakibatkan perunggasan di Kabupaten Ciamis terpuruk, karena Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten Bebas Avian Influenza (AI).

Populasi ternak sapi potong di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2005 sebanyak 27.794 ekor. Peternakan sapi potong tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis, namun yang memiliki ternak sapi potong di atas 2000 ekor berada di Kecamatan Cimerak, Cijulang, Rancah, Tambaksari, Cigugur, Parigi, dan Langkaplancar. Jika dibandingkan dengan selama 10 tahun terakhir, populasi ternak sapi potong mengalami penurunan jumlahnya. Walaupun demikian, mulai Tahun 2003 selain peternakan sapi potong juga dikembangkan peternakan sapi perah dengan populasi pada Tahun 2005 mencapai 91 ekor dengan produksi susu sebanyak 370.461 Lt.

Di sektor perikanan perkembangan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) terus mengalami peningkatan jumlahnya baik pada kegiatan perikanan tangkap, maupun perikanan budidaya/perikanan darat. Produksi perikanan, khususnya perikanan air tawar pada Tahun 2005 mencapai jumlah produksi sebanyak 10.134 ton per tahun. Produksi unggulan ikan air tawar di Kabupaten Ciamis adalah ikan gurame dan udang galah dengan produktivitas yang masih relatif rendah. Pemasaran hasil budi daya perikanan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Khusus untuk udang galah dengan produksi yang masih relatif terbatas pemasarannya diarahkan untuk memenuhi pasar lokal dan regional.

Potensi perikanan tangkap Kabupaten memiliki panjang pantai 91 Km dan areal fishing ground seluas 682 Km². Hasil produksi perikanan laut Tahun 2005 yang terdiri atas perikanan tangkap : produksi udang sebanyak 212,70 ton dan produksi ikan sebanyak 1.205,58 ton per tahun. Dilihat dari perkembangan selama sepuluh tahun terakhir cenderung menurun. Selain potensi perikanan tangkap dikembangkan juga perikanan budidaya payau, terutama untuk jenis udang windu dan ikan kerapu. Pemasaran produksi ikan tangkap dan udang diekspor oleh perusahaan lokal dengan negara tujuan Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat.

Selama sepuluh tahun terakhir luas hutan rakyat terus meningkat. Pada Tahun 2005 hutan rakyat mencapai luas sekitar 23.000 Ha. Produksi kayu rakyat yang tercatat melalui sistem pelayanan tata usaha kayu pada Tahun 2003 (10.878,135 m³), 2004

(214.070,243 m3), 2005 (326.743,616 m3) dan 2006 (447.319,937 m3) dengan jenis-jenis kayu unggulan Albasia, Mahoni, Jati dan Rimba campuran.

Permasalahan utama yang berkaitan dengan usaha tani hutan rakyat antara lain rata-rata pemilikan lahan kering yang relatif sempit, belum optimalnya penerapan sistem silvikultur, kualitas tegakan yang relatif rendah, penebangan yang kurang terkendali mengikuti kebutuhan, hasil produksi pada umumnya dijual dalam bentuk log dan hasil olahan sederhana dengan nilai tambah relatif rendah, sistem tata niaga yang merugikan petani, serta masih adanya kesenjangan antara supply (pasokan) dan demand (kebutuhan).

Dalam upaya mendukung pengembangan bidang pertanian dan kehutanan, Pemerintah Kabupaten Ciamis menyediakan petugas yang mempunyai jabatan fungsional sebagai penyuluh kehutanan sebanyak 60 orang, penyuluh pertanian 205 orang dan penyuluh pertanian sektor perikanan sebanyak 19 orang.

3. Bidang Industri dan Perdagangan

Potensi industri di Kabupaten Ciamis masih didominasi industri kecil rumah tangga. Komoditas andalan industri kecil dan rumah tangga adalah: makanan olahan, gula merah, kerajinan anyaman, kerajinan sandang, mebeuler, dan alat dapur dari aluminium.

Peran lapangan usaha industri terhadap PDRB pada Tahun 1996 sebesar 22,74%, sedangkan pada Tahun 2004 sebesar 7,04% dan lapangan usaha perdagangan sebesar 17,27%. Hal ini menunjukkan bahwa peran bidang perdagangan dan industri mengalami peningkatan selama periode Tahun 1996-2004. Kontribusi bidang perdagangan dan industri terhadap PDRB Kabupaten Ciamis merupakan kedua terbesar setelah bidang pertanian.

Perkembangan investasi dari sektor industri selama periode Tahun 1996–2005 mengalami kenaikan sebesar 18%. Pada Tahun 1996, nilai investasi terbesar diperoleh dari industri kecil formal, yaitu sebesar Rp.13.983.306.000,- untuk industri kecil formal dan Rp. 11.697.940.000,- untuk industri kecil informal. Namun pada Tahun 2005 nilai investasi terbesar berasal dari industri kecil informal, yaitu sebesar Rp.19.362.076.000,-.

Perkembangan jumlah dan nilai investasi di sektor perdagangan melalui kegiatan perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil formal dan perusahaan kecil nonformal mengalami pertumbuhan. Jumlah perusahaan perdagangan besar pada Tahun 1996 sebanyak 18 unit usaha dengan modal usaha sebesar Rp. 12.682.821.493.000,-. Pada Tahun 2005 sebanyak 38 unit usaha dengan modal usaha sebesar Rp. 34.962.821.493.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di sektor perdagangan besar mengalami pertumbuhan, yaitu pertambahan unit usaha sebesar 111,11 % dan pertambahan modal usaha sebesar 171,81 %. Sektor perdagangan lain yang mengalami pertumbuhan adalah perusahaan kecil nonformal yang bertambah 102,33 % dan pertambahan nilai investasi sebesar 72,48 %, yaitu pada Tahun 1996 sebanyak 3.950 unit usaha. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan unit usaha sektor perdagangan sebesar 70,92 % dengan pertambahan nilai investasi 99,94 %.

Kegiatan perdagangan di Kabupaten Ciamis sampai Tahun 2005 ditopang oleh dua unit pasar modern, 68 unit pasar tradisional dan 559 unit pertokoan. Sementara itu, perkembangan usaha ekspor ditandai dengan keragaman komoditas dan nilai ekspor. Jenis komoditas yang diekspor adalah hasil laut (Ikan dan Udang), dan kayu olahan. Nilai ekspor komoditas tersebut pada Tahun 2005 mencapai US \$ 1,241,780.99.

4. Bidang Kepariwisata

Kabupaten Ciamis memiliki potensi wisata yang cukup besar, karena memiliki objek dan daya tarik wisata yang cukup lengkap, yaitu objek wisata alam, wisata minat khusus, dan wisata budaya. Objek wisata yang tercatat dan sudah berlangsung, di antaranya:

Objek Wisata Budaya sebanyak enam lokasi, Objek Wisata Alam sebanyak 11 (sebelas) lokasi dan Objek Wisata Minat Khusus sebanyak 5 (lima) lokasi.

- a. Objek Wisata budaya yaitu Situ Lengkung Panjalu, Astana Gede, Karang Kamulyan, Kampung Kuta, Urug Kasang, dan Situs Gunung Susuru.
- b. Objek Wisata alam yaitu Karapyak, Palataran Agung, Majingklak, Lembah Putri, Pangandaran, Cagar alam Pananjung, Batuhiu, Batukaras, Keusikluhur, Karangtirta, dan Madasari.
- c. Objek Wisata Minat Khusus yaitu Curug Tujuh, Curug Panganten, Citumang, Goa Donan, Karang Nini, dan Cukang Taneuh (*Green Canyon*)

Selain objek wisata yang telah dikembangkan, kegiatan-kegiatan yang mempunyai potensi dalam mendukung pariwisata daerah adalah kegiatan wisata berskala internasional yaitu festival layang-layang; kegiatan wisata berskala lokal yaitu hajatan bumi, hajatan laut, nyuguh, babarit, nyangu, nyiar lumar, pesta seni tradisional, dsb; industri cendramata; makanan khas; sarana transportasi; kegiatan pentas seni daerah, seperti ronggeng gunung, ronggeng amen, seni tradisi lainnya (gendang buhun, reog, calung, badut) dan fasilitas olah raga.

Hal lain yang mendukung kegiatan kepariwisataan adalah kondisi sarana dan prasarana (akomodasi) kepariwisataan. Sarana dan prasarana kepariwisataan, seperti hotel, restoran/rumah makan dengan dominasi sebaran (90%) di Kecamatan Pangandaran. Dibandingkan dengan kondisi Tahun 1996 akomodasi kepariwisataan yang diukur dari ketersediaan hotel/pondok wisata, rumah makan secara umum mengalami kenaikan sebesar 6,25 %.

Perkembangan jumlah pengunjung ke objek wisata di Kabupaten Ciamis selama sepuluh tahun (1996-2005) mengalami pasang surut. Hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian masyarakat. Di samping itu penurunan drastis terhadap jumlah pengunjung wisata pantai sebesar 70% sebagai akibat bencana Tsunami yang terjadi pada bulan Juli 2006 yang melanda hampir semua Objek Wisata Pantai di Kabupaten Ciamis.

5. Bidang Ketenagakerjaan

Pada periode 1996-2005 perkembangan kesempatan kerja bagi penduduk Kabupaten Ciamis pada sektor-sektor ekonomi (sektor industri, pariwisata dan perdagangan serta jasa) terus meningkat, tetapi kesempatan kerja tersebut belum dapat memenuhi kuota bagi pemenuhan kebutuhan lapangan pekerjaan. Selain itu, terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Ciamis pada Tahun 1999/2000 sebanyak 51.517 orang dan pada Tahun 2003 sebanyak 60.154 orang. Terjadi peningkatan jumlah pencari kerja sebesar 16,76% dengan tingkat pencari kerja sebesar 2,59% pada Tahun 2000 dan 2,63% pada Tahun 2003.

Selama Tahun 1996 pencari kerja yang terdaftar sebanyak 3.736 orang dengan jumlah pencari kerja terbesar berasal dari lulusan SLTA, yaitu sebanyak 2.483 orang. Pada Tahun 2004 sebanyak 12.381 orang (naik sebanyak 8.645 orang). Pada Tahun 2005 jumlah pencari kerja sebanyak 12.381 orang, dan pencari kerja terbesar berpendidikan SLTA, yaitu sebanyak 5.416 orang dan berpendidikan S1 sebanyak 4.849 orang.

Jumlah kesempatan kerja yang telah terisi pada Tahun 1996 sebanyak 6.063 orang dan pada Tahun 2004 sebanyak 1.901 orang. Pada Tahun 2004 kesempatan kerja terbesar berada di sektor industri, bangunan, jasa-jasa dan pertanian. Dengan rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 4,04 % dan laju pertumbuhan PDRB 3,70 % selama lima Tahun terakhir, rata-rata kesempatan kerja di Kabupaten Ciamis sebesar 1.210 orang. Jika dibandingkan dengan kesempatan kerja selama 10 Tahun terakhir, rata-rata kesempatan kerja cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan laju angkatan kerja yang tumbuh relatif lebih besar.

6. Bidang Keuangan Daerah

Dengan lahirnya peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa konsekuensi terhadap keuangan daerah yang terus mengalami perubahan. Namun demikian, tingkat pendapatan daerah tetap dapat dideteksi. Data keuangan daerah selama Tahun 1996–2005 menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Ciamis terus meningkat, kecuali pada Tahun 2000 terjadi penurunan sebesar 7,08%. Pada Tahun 1995–1997 yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan daerah adalah berasal dari lain-lain pendapatan yang sah. Mulai Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2004 penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan merupakan sumber pendapatan terbesar dalam APBD Kabupaten Ciamis. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis hanya memberikan kontribusi rata-rata 6,14% per tahun selama sepuluh tahun terakhir terhadap pendapatan.

Seiring dengan meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, APBD Kabupaten Ciamis terus mengalami peningkatan jumlah. Pada Tahun 1996 jumlah APBD Ciamis sebesar Rp. 134.210.060.216,-, pada Tahun 2000 jumlahnya bertambah menjadi Rp.310.712.872.102,- atau mengalami kenaikan 131,51 % dengan rata-rata kenaikan setiap tahunnya 31,70 %. Kemudian mulai Tahun 2001, seiring dengan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, jumlah APBD mengalami kenaikan jumlahnya mencapai 139,63 % dibandingkan Tahun 2000. selama periode Tahun 2001 s.d. 2005 kenaikan jumlah APBD rata-rata setiap tahunnya mencapai 37,58%.

Pada periode Tahun 1996-2005 terdapat perbedaan sumber pendapatan APBD Kabupaten Ciamis, yaitu antara Tahun 1998-2005 terdapat pergeseran dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah yang mengalokasikan belanja pegawai ke dalam struktur APBD. Oleh karena itu, kondisi keuangan daerah antara Tahun 1996-2005 terdapat perbedaan yang sangat fundamental, yaitu pada Tahun 1996 pendapatan terbesar bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sejak Tahun 1998 sumber pendapatan terbesar pada dana perimbangan. Pada Tahun 2005 kondisi dana perimbangan mencapai angka 90,91 % dari seluruh Anggaran Pendapatan Kabupaten Ciamis. Selain itu, kondisi ini membawa konsekuensi pada struktur APBD Kabupaten Ciamis, yaitu Tahun 1996 belanja pembangunan lebih besar jika dibandingkan dengan belanja rutin dan sejak Tahun 1998 belanja rutin lebih besar daripada belanja pembangunan.

Gambaran terakhir jumlah pendapatan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 557.234.953.145, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 25.588.398.678,28, bagian dana perimbangan sebesar Rp. 506.589.554.467,00,- dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 25.057.000.000,-. Sedangkan jumlah belanja sebesar Rp. 464.432.163.499,- yang terdiri dari: belanja aparatur daerah (belanja langsung) sebesar Rp. 113.313.944.079,- dan belanja pelayanan publik (belanja tidak langsung) sebesar Rp. 351.118.219.420,-. Jumlah pembiayaan yang meliputi pembiayaan penerimaan daerah sebesar Rp. 27.120.677.669,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 4.714.453.310,-.

2.1.3 SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG

Sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang merupakan bidang yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini berkaitan erat dengan upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ketiga bidang ini merupakan potensi yang harus dimanfaatkan secara tepat dan bijaksana dalam pembangunan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya alam perlu didukung oleh pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang secara berkesinambungan.

1. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa lalu, saat ini, maupun masa mendatang. Sumberdaya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa dan modal pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pemanfaatan sumberdaya alam ini belum memerhatikan keberlanjutan atas ketersediaannya, agar dapat mengantisipasi krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan sebagai dampak pemanfaatan tersebut.

Kabupaten Ciamis telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, antara lain:

- a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan daya dukung, seperti kegiatan pertambangan/penggalan, kepariwisataan, budidaya pertanian, dan kehutanan serta pembuatan prasarana yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada menjadi sumber daya buatan lain seperti irigasi, bendungan, jalan, jembatan, dan dam pengendali.
- b. Optimalisasi penyelamatan tanah dan air melalui upaya rehabilitasi kawasan yang berfungsi sebagai kawasan hidrologis dan rawan bencana.
- c. Meningkatkan, memperkuat, dan mengevaluasi ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang landasan program/pemanfaatan ruang melalui penyusunan Perda Tata Ruang yang lebih detail dan akomodatif sehingga mendukung pada upaya pemanfaatan sumber daya alam secara lebih baik.

Berbagai upaya yang dilakukan dan telah membuahkan hasil yang konkret di antaranya adalah:

- a. Pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti galian kapur, posfat, batu pasir, gambut dan tanah telah memiliki pengetahuan tentang cara yang baik dalam penambangan dan pemeliharaan lingkungan di areal tambang.
- b. Meningkatnya kelompok masyarakat yang peduli lingkungan dan penilaian dokumen rencana pengelolaan lingkungan, serta menurunnya pencemaran lingkungan.
- c. Rehabilitasi lahan kritis, baik secara vegetatif maupun sipil teknis sehingga luas lahan kritis (kategori kritis dan sangat kritis) di luar kawasan hutan menurun dari 18.243 ha pada Tahun 1999 menjadi 5.560 ha pada Tahun 2003, yang dilakukan melalui reboisasi dan pembuatan bangunan pengendali erosi.

2. Penataan Ruang

Pengaturan tata ruang sesuai dengan peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang untuk mengatasi krisis tata ruang. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan sebagai: arahan lokasi kegiatan, batasan kemampuan lahan termasuk daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, dan efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan. Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana.

Dalam rangka pemanfaatan potensi lokal pengembangan wilayah di Kabupaten Ciamis dibagi dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan, yaitu

- a. Wilayah Pengembangan (WP) Utara dengan pusat utama Kota Ciamis dan pusat pembantu Kota Kawali yang terdiri dari:
 - Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Utara I dengan pusat SWP Panjalu mencakup Panumbangan, Panawangan, Sukamantri dan Panjalu;
 - Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Utara II dengan pusat SWP Kawali mencakup Jatinagara, Cipaku, Lumbung dan Kawali;
 - Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Utara III dengan pusat SWP Cikoneng mencakup Cihaurbeuti, Sadananya, Sindangkasih, Ciamis, Baregbeg, Cijeungjing dan Cikoneng;

- Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Utara IV dengan pusat SWP Rancah mencakup Sukadana, Tambaksari, Cisaga, Rajadesa dan Rancah.
- b. Wilayah Pengembangan (WP) Tengah dengan pusat utama Kota Banjarsari dan pusat pembantu Kota Padaherang yang terdiri dari:
 - Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Tengah I dengan pusat SWP Padaherang mencakup Lakbok, Mangunjaya, Purwadadi, Banjarsari dan Padaherang;
 - Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Tengah II dengan pusat SWP Pamarican mencakup Cimaragas, Cidolog, Langkaplancar dan Pamarican.
- c. Wilayah Pengembangan (WP) Selatan dengan pusat utama Kota Pangandaran, pusat pembantu Kota Cijulang yang terdiri dari:
 - Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Selatan I dengan pusat SWP Kalipucang mencakup Kalipucang dan Pangandaran;
 - Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Selatan II dengan pusat SWP Parigi mencakup Cigugur, Sidamulih dan Parigi;
 - Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Selatan III dengan pusat SWP Cijulang mencakup Cimerak dan Cijulang;

Pembagian fungsi wilayah setiap Sub Wilayah Pengembangan (SWP) adalah sebagai berikut:

- a. Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Utara
 - Sub Wilayah Pengembangan Utara I dengan pusat kota Panjalu mempunyai fungsi pusat pelayanan sosial ekonomi, perikanan darat, kawasan lindung (perlindungan daerah bawah, resapan air dan suaka), kawasan budidaya hutan agroforestry, pertanian tanaman pangan lahan kering dan basah, perikanan budidaya air tawar, hortikultura, hutan produksi, peternakan, serta cagar alam dan budaya;
 - Sub Wilayah Pengembangan Utara II dengan pusat kota Kawali mempunyai fungsi pengembangan kawasan hutan produksi, pertanian tanaman pangan lahan kering, perikanan budidaya air tawar, perkebunan, hortikultura, kawasan budidaya hutan agroforestry, pusat pelayanan sosial ekonomi, cagar budaya, industri rumah tangga, kawasan lindung (perlindungan daerah bawahannya, resapan air dan suaka);
 - Sub Wilayah Pengembangan Utara III dengan pusat kota Cikoneng mempunyai fungsi pengembangan perikanan budidaya air tawar, pusat Pemerintahan, pusat pendidikan, kawasan lindung (perlindungan daerah bawah, resapan air dan suaka), kawasan budidaya hutan agroforestry, pusat transportasi darat, industri kecil dan rumah tangga, pusat pelayanan sosial, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, cagar budaya, dan pengembangan perumahan dan permukiman;
 - Sub Wilayah Pengembangan Utara IV dengan pusat kota Rancah mempunyai fungsi pengembangan perikanan budidaya air tawar, pusat pelayanan sosial ekonomi, perkebunan, kawasan lindung (perlindungan daerah bawah, resapan air dan suaka), kawasan budidaya hutan *agroforestry*, hutan produksi, pertanian tanaman pangan lahan kering, hortikultura, peternakan, industri rumah tangga, dan kawasan konservasi budaya dan sejarah;
- b. Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Tengah
 - Sub Wilayah Pengembangan Tengah I dengan pusat kota Padaherang mempunyai fungsi pengembangan pertanian lahan basah (lambung padi), pertanian tanaman pangan lahan kering, kawasan budidaya hutan agroforestry, hutan produksi, industri kecil, pusat perdagangan dan jasa, perikanan budidaya air tawar, peternakan unggas, serta pengembangan perumahan dan permukiman;
 - Sub Wilayah Pengembangan Tengah II dengan pusat kota Pamarican mempunyai fungsi pengembangan pertanian lahan basah, pertanian tanaman pangan lahan kering, perikanan budidaya air tawar, kawasan budidaya hutan agroforestry, hutan produksi, pertambangan, pengembangan perumahan dan permukiman baik perkotaan maupun perdesaan, dan industri kecil.

- c. Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Selatan
- Sub Wilayah Pengembangan Selatan I dengan pusat kota Kalipucang mempunyai fungsi pusat transportasi darat, kawasan pariwisata (pusat wisata bahari), kawasan lindung (suaka alam dan cagar alam), perikanan laut dan perikanan budidaya air tawar.
 - Sub Wilayah Pengembangan Selatan II dengan pusat kota Parigi mempunyai fungsi pengembangan pertanian tanaman pangan lahan kering, hortikultura, perikanan laut dan perikanan budidaya air tawar, kawasan pariwisata, pusat kenelayanan, hutan produksi;
 - Sub Wilayah Pengembangan Selatan III dengan pusat kota Cijulang mempunyai fungsi kawasan pariwisata, pusat transportasi udara, pertambangan, perkebunan, pertanian tanaman pangan lahan kering, perikanan laut dan perikanan budidaya air tawar (kolam) dan perikanan budidaya air payau (tambak), dan peternakan besar.

Kehadiran revisi UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, dan PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mensyaratkan sinergitas antara RTRW Nasional dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Komitmen antar-tingkatan pemerintahan dalam mensinergiskan dan mengoperasionalkan rencana tersebut akan dapat menciptakan kondisi tata ruang yang sesuai dengan rencana.

Dalam pengaturan penggunaan ruang di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan peraturan mengenai perencanaan tata ruang, yaitu RTR Kawasan Pusat Pemerintahan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), dan Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK). Namun demikian, sampai dengan Tahun 2005 hanya 14 wilayah kecamatan yang sudah mempunyai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), yaitu Kecamatan Pangandaran, Parigi, Cijulang, Kalipucang, Banjarsari, Cisaga, Cijeungjing, Ciamis, Cikoneng, Cihaurbeuti, Panumbangan Kawali, Rancah dan Panjalu. Di antara 14 Wilayah Kecamatan yang sudah mempunyai RUTR ada 4 Kecamatan yang harus dikaji ulang antara lain: Kecamatan Panjalu, Panumbangan, Cikoneng, dan Pangandaran.

2.1.4 INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Transportasi

Transportasi merupakan bidang yang memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas penduduk, peningkatan perekonomian, dan distribusi barang dan jasa. Potensi sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Ciamis meliputi jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa, Dermaga Majingklak, Bandar Udara Nusawiru, dan jalur KA Lintas Selatan.

Panjang jalan selama periode Tahun 1996-2005 mengalami peningkatan. Pada Tahun 1996, panjang jalan di Kabupaten Ciamis adalah sepanjang 496,160 km, dengan perincian jalan nasional 55,120 Km, jalan Provinsi 159,850 Km dan jalan kabupaten 281,190 Km. Pada Tahun 2005, panjang jalan di Kabupaten Ciamis mencapai 4.793,6 km, dengan rincian: jalan nasional 109,575 Km, jalan Provinsi 100,5 Km, jalan kabupaten 762,8 Km dan jalan Desa 3.820,67 Km.

Pada Tahun 1996 kondisi jalan di Kabupaten Ciamis adalah 53,29 % dalam kondisi baik/sedang dan 14,22 % dalam kondisi rusak/rusak berat. Pada Tahun 2005, seiring dengan perubahan status kewenangan jalan di Kabupaten Ciamis diketahui 38,45% dalam kondisi baik dan 61,55 % dalam kondisi rusak/rusak berat.

Peningkatan penggunaan angkutan umum yang melayani trayek transportasi di dalam dan ke luar Kabupaten Ciamis disebabkan oleh perbaikan ekonomi serta perbaikan pengelolaan armada angkutan. Untuk transportasi air yang tersedia di Majingklak mengalami penurunan fungsi. Bandara Udara Nusawiru yang merupakan alat transportasi

udara pada saat ini belum menunjukkan prospek yang menggembirakan. Hal ini dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan mancanegara yang cenderung berkurang sebagai dampak pasca gempa dan tsunami di wilayah selatan Kabupaten Ciamis.

Jaringan trayek angkutan kota, angkutan perdesaan dan angkutan perbatasan yang melayani penduduk di Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 1996 sebanyak 63 jaringan, sedangkan pada Tahun 2006 meningkat 70% menjadi 107 jaringan. Jumlah armada angkutan umum sampai dengan Tahun 1996 sebanyak 792 kendaraan dan meningkat 42% pada Tahun 2006 menjadi 1126 kendaraan. Pengembangan jaringan trayek di Kabupaten Ciamis masih sangat terbuka karena dari 36 kecamatan yang ada baru 13 kecamatan yang menjadi simpul jaringan trayek. Pengembangan jaringan trayek ini memang masih mengalami hambatan mengingat adanya angkutan tidak resmi yang masih beroperasi.

Selain itu, adanya kerusakan sebagian besar ruas jalan yang ditetapkan sebagai jaringan trayek dan kurangnya minat sebagian masyarakat usaha di bidang angkutan khususnya mengisi jaringan trayek yang tersedia, juga menjadi permasalahan lain dalam pengembangan jaringan trayek angkutan. Padahal kebutuhan masyarakat akan angkutan umum sangat besar bila diasumsikan 10% masyarakat Ciamis menggunakan angkutan umum maka kebutuhan armada angkutan umum sampai dengan Tahun 2005 saja sebanyak 13.300 kendaraan.

Jumlah terminal dan sub terminal yang ada di Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 1996 sebanyak 11 unit sedangkan pada Tahun 2006 telah meningkat 36% menjadi 15 unit. Hambatan yang dihadapi dalam operasional terminal adalah adanya terminal-terminal bayangan pada ruas-ruas jalan tertentu yang mengganggu operasional terminal resmi, terminal/subterminal digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (seperti pedagang kaki lima dan lain-lain). Selain itu, hambatan lain yang berkaitan dengan terminal adalah belum tersedia lahan/lokasi untuk pembangunan terminal dan besarnya biaya pembangunan terminal. Dalam rangka peningkatan pelayanan terminal, maka telah diusulkan agar dilakukan relokasi Terminal Ciamis ke Imbanagara agar lebih representatif karena lokasinya di pinggir kota dan jalan nasional.

Kabupaten Ciamis dilalui oleh jalur kereta api yang menghubungkan Bandung-Surabaya. Stasiun pemberhentian yang ada sebanyak satu buah yaitu Stasiun Ciamis, dengan demikian pengangkutan produksi daerah ke sentra-sentra pemasaran juga dapat diangkut oleh kereta api. Pada Tahun 1996 banyaknya bagasi yang dapat diangkut melalui jalur transportasi kereta api sebesar 123.485 kg. dan jumlah penumpang sebanyak 244.619 orang dengan nilai hasil penjualan karcis sebesar Rp. 1.103.868.050,-. Sedangkan lalu lintas barang yang memanfaatkan jasa transportasi kereta api sebesar 145.36 ton atau 18.381,2 ton/km dengan jarak rata-rata 127 km.

Pada Tahun 2005 banyaknya bagasi yang dapat diangkut melalui jalur transportasi kereta api sebesar 815 kg dan jumlah penumpang sebanyak 20.749 orang dengan nilai hasil penjualan karcis sebesar Rp. 576.297.000,-.

Perhubungan laut/sungai di Kabupaten Ciamis yang ada sekarang ini yaitu Dermaga Majingklak di Kecamatan Kalipucang, yang pada periode sepuluh Tahun terakhir mengalami penurunan berkaitan dengan dibangunnya jembatan penghubung ke Cilacap dan kualitas sarana dan prasarana transportasi yang ada di Dermaga Majingklak. Pada saat ini jumlah armada yang ada adalah kapal ferry sebanyak satu buah dengan pelayanan satu kali pulang pergi dalam satu hari.

Sejak Tahun 1993 Kabupaten Ciamis telah membangun Bandara Nusawiru sebagai lapangan terbang kelas 4 yang berada di Kecamatan Cijulang dengan luas efektif 28,50 Ha dengan panjang landasan pacu 1,5 km dan dilengkapi dengan sarana fasilitas bandara. Bandara udara Nusawiru mampu dilandasi pesawat jenis CN-235 dan telah diujicobakan penerbangan komersial sampai dengan bulan Maret 2005.

2. Irigasi, Drainase, dan Air Bersih

Dalam rangka membantu meningkatkan hasil produksi pertanian khususnya beras sampai dengan Tahun 2005 prasarana irigasi yang telah dibangun sebanyak 489 Daerah Irigasi (DI) yang dapat mengairi 38.803 ha atau 41 % luas area sawah yang ada. Adapun sumber air baku untuk kegiatan irigasi dan penyediaan air bersih PDAM bersumber dari 503 sungai yang tersebar di beberapa kecamatan.

Pelayanan kebutuhan air bersih di Kabupaten Ciamis secara umum dikelola oleh perusahaan daerah PDAM Tirta Galuh Ciamis yang telah mempunyai wilayah operasi dengan enam Cabang Wilayah pelayanan dari 36 kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis, cabang-cabang tersebut adalah Cabang Ciamis melayani empat kecamatan, Cabang Sindangkasih melayani tiga kecamatan, Cabang Banjarsari melayani tiga kecamatan, Cabang Kawali melayani satu kecamatan, Cabang Panumbangan melayani dua kecamatan dan Cabang Pangandaran melayani empat kecamatan. Sampai dengan Tahun 2005, baru 17 kecamatan yang sudah memperoleh fasilitas air bersih dari PDAM. Penduduk Kabupaten Ciamis yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan sampai dengan Tahun 2005 mencapai 17.248 Saluran Langganan dengan volume air yang dikonsumsi sebanyak 4.411.583 m³.

Namun demikian, dalam upaya penyediaan sarana air bersih melalui kebijakan pemerintah pusat serta kebijakan pemerintah daerah telah dibangun sarana dan prasarana air bersih lainnya yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat, di antara program pemerintah tersebut adalah program WSLIC pada Tahun 2002 yang realisasi kegiatannya mulai Tahun 2005 dan berakhir pada Tahun 2008 untuk 100 desa di Kabupaten Ciamis. Sampai dengan Tahun 2005 melalui program WSLIC telah dibangun sarana air bersih di 29 desa yang meliputi sembilan kecamatan. Peningkatan sarana air bersih yang dibiayai dari APBD Kabupaten Ciamis jumlahnya masih terbatas. Keterbatasan penyediaan sarana air bersih, berdampak pada masih terdapat wilayah yang kekurangan sarana air bersih pada saat musim kemarau yang berakibat pada penurunan kualitas kesehatan masyarakat karena masalah sanitasi lingkungan dan perilaku hidup sehat.

3. Telekomunikasi, Informasi, dan Ketenagalistrikan

Sampai dengan Tahun 2005 pembangunan jaringan telekomunikasi yang dilaksanakan oleh pihak Telkom maupun Indosat sudah menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Ciamis. Jumlah saluran sambungan telepon sampai dengan Tahun 2005 sebanyak 21.854 saluran sambungan di 36 Kecamatan. Selanjutnya dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan banyaknya penyedia jasa telekomunikasi, hampir di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis sudah dapat mengakses komunikasi langsung. Kondisi telekomunikasi yang belum berkembang di Kabupaten Ciamis adalah pelaksanaan e-government, sebagai media efektif yang dapat memberikan layanan informasi dan promosi daerah.

Ketenagalistrikan melalui jaringan PLN sampai dengan Tahun 2005 telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah di Kabupaten Ciamis dengan jumlah daya terpasang bagi rumah tangga 134.191.321 Kwh, Usaha/Hotel 11.674.923 Kwh, instansi Pemerintah 1.041.364 Kwh, Sosial 5.879.775 Kwh, industri 4.353.264 Kwh dan penerangan jalan umum sebanyak 3.046.590 Kwh. Jumlah tenaga listrik yang diterima/dialokasikan di Kabupaten Ciamis sebesar 189.920.894 Kwh dengan tingkat penggunaan pada Tahun 2005 sebesar 160.947.434 Kwh.

2.1.5 PEMERINTAHAN

Pemerintahan yang berbasis *clean governance* mensyaratkan adanya jejaring kerja dan kemitraan antara seluruh *stakeholders*, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat (*civil society*). Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan tidak hanya bertumpu pada kapasitas pemerintah sebagai aktor tunggal dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan. Namun perlu sinergis di antara seluruh aktor terkait dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Oleh karena itu,

keberhasilan penerapan *clean governance* tidak hanya ditentukan dari seberapa besar kapasitas pemerintah dalam mewujudkan sinergitas *stakeholders*. Hal tersebut sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan mediator dalam melangsungkan tata kelola pemerintahan.

1. Bidang Politik

Kondisi politik di Kabupaten Ciamis sejak pelaksanaan Pemilu Tahun 1999 sampai dengan Sidang Istimewa (SI) MPR dapat dikatakan sangat kondusif, tenang, dan stabil. Hal ini karena adanya kebebasan dan peningkatan kedewasaan berpolitik rakyat dalam menggunakan hak politiknya. Pada Pemilu Tahun 1997 di Kabupaten Ciamis hanya terdapat 3 partai politik. Pada pemilu Tahun 1999 dengan jumlah partai politik di Indonesia sebanyak 48 partai politik peserta pemilu, di Kabupaten Ciamis terdapat 43 partai politik peserta pemilu.

Pada Pemilu Tahun 1999 jumlah pemilih di Kabupaten Ciamis ada sejumlah 1.040.580 orang, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya ada 951.782 orang (91,47 % dari jumlah pemilih), sehingga yang tidak menggunakan hak pilih hanya sejumlah 88.798 Orang (8,53%). Hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada Tahun 1999 menghasilkan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Ciamis dengan urutan terbanyak PDIP 12 kursi, Partai Golkar 10 kursi, PPP 9 kursi, PKB 3 kursi, PAN 2 kursi, PBB 2 kursi, Partai Keadilan 1 kursi, dan PKP 1 kursi.

Pada Pemilu Legislatif Tahun 2004 di Kabupaten Ciamis telah terdaftar calon peserta pemilih sebanyak 1.082.860 orang dari jumlah penduduk sebanyak 1.520.772 jiwa. Penduduk yang telah berperan secara aktif dengan menggunakan hak pilihnya sebanyak 855.729 orang pemilih (79,02 %). Pada pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 5 April 2004 dan telah ditetapkan hasilnya pada tanggal 2 Agustus 2004 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Perolehan suara untuk menentukan jumlah kursi anggota DPRD dari Pemilu Tahun 2004 adalah sebagai berikut: Partai Golkar 14 kursi, PDIP 12 kursi, PPP 7 kursi, PKS 4 kursi, PAN 3 kursi, PKB 2 kursi, PKPI 1 kursi, PBB 1 kursi dan Partai Demokrat 1 kursi.

Pada Tahun 2004 terdapat hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu legislatif di Kabupaten Ciamis, antara lain adalah:

- a. Semua kegiatan dan logistik pemilu langsung ditangani oleh pusat (sentralisasi). Penyelenggara di tingkat pusat kurang memerhatikan kondisi daerah dan merancang kegiatan berdasarkan pemikiran teoritis, sehingga penerapannya menyulitkan pelaksana di daerah seperti di TPS/KPPS. Kondisi ini sangat berpengaruh pada penyelenggaraan, misalnya laporan dalam Berita Acara dibuat berbelit-belit sehingga KPPS berkesulitan dalam menyelesaikannya.
- b. Keterlambatan panduan atau petunjuk teknis (juknis) sampai ke daerah sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemilu kurang efektif.
- c. Oleh karena berbagai alasan, masih terdapat penduduk yang belum terdaftar pada pemilu legislatif, maka sampai dengan tanggal 29 Mei 2004 dalam pelaksanaan pemilihan presiden/wakil presiden Tahun 2004 dilakukan pendaftaran pemilih tambahan.

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2004 tahap I jumlah calon peserta pemilih tercatat sebanyak 1.112.117 orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 932.550 orang dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 179.567 orang. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahap II tercatat jumlah calon pemilih sebanyak 1.110.023 orang, namun pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 898.202 orang dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 211.821 orang.

Dalam melaksanakan pembangunan bidang politik yang masih mencari bentuk, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ciamis telah berhasil menciptakan situasi yang kondusif, yang dapat dilihat dalam pelaksanaan Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 baik dalam Pemilihan Presiden maupun pemilihan anggota DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis.

Penyelenggaraan pemilu ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang keorganisasiannya bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di samping itu, partai-partai politik selaku peserta pemilu ditata kembali dengan tujuan menjadi partai yang lebih sehat, dewasa, dan demokratis. Ketentuan dan peraturan yang mengatur susunan lembaga perwakilan rakyat turut diperbaharui agar kinerja legislatif bertambah meningkat. Demikian pula, kehadiran Mahkamah Konstitusi telah menjamin penegakan konstitusi dan prinsip negara sebagai Negara Hukum yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat di negara Republik Indonesia.

Semua perubahan peraturan perUndang-Undangan di Indonesia dimaksudkan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis. Perubahan peraturan tersebut ditandai dengan lahirnya 5 (lima) Undang-Undang bidang politik, yang meliputi :

- a. Undang-Undang nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- b. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
- c. Undang-Undang nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Undang-Undang;

Pemilu secara nasional Tahun 2004 dengan model baru dapat dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Ciamis. Pemilihan DPR dan DPRD diikuti oleh 24 Partai Politik, sedangkan pemilihan DPD diikuti secara perseorangan. Pada Tahun 2004 juga berlangsung Pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung. Seluruh penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif dan Presiden/Wakil Presiden berlangsung damai di Kabupaten Ciamis. Sepanjang kurun waktu normal akan terjadi penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2009, 2014, 2019 dan 2024.

2. Bidang Hukum

Pembangunan hukum dalam kerangka *good governance* diukur berdasarkan orientasi Pemerintah yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga masyarakat, terutama dalam kinerja pelayanan publik. Fungsi penegakan hukum diperlukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat pada pemegang otoritas. Dengan demikian pembangunan hukum berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai aturan dan penegakan aturan tersebut guna melindungi hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pencapaian kondisi tertib sosial kemasyarakatan yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, juga berkaitan dengan penegakan hukum secara berkeadilan.

Dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ciamis dalam periode Tahun 1993 sampai dengan 1998 jumlah peraturan daerah yang ditetapkan sebanyak 103 buah. Pada periode Tahun 1999 sampai dengan 2003 produk hukum daerah yang diterbitkan antara lain Peraturan Daerah sebanyak 139 buah; Keputusan Bupati sebanyak 2.057 buah; Instruksi Bupati sebanyak 18 buah; dan Surat Perjanjian sebanyak 67 buah. Bidang-bidang Pemerintahan yang diatur dalam produk hukum tersebut, terdiri atas: Bidang Kependudukan sebanyak 8 buah, Bidang Agama sebanyak 39 buah; Bidang Sosial Budaya: (1) Pendidikan sebanyak 55 buah, (2) Kesehatan sebanyak 59 buah, (3) Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 26 buah, (4) Kesejahteraan Sosial sebanyak 47 buah, (5) Budaya sebanyak 19 buah; Bidang Ekonomi sebanyak 425 buah; Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebanyak 91

buah; Bidang Tata Ruang sebanyak 123 buah; Bidang Transportasi sebanyak 33 buah; Bidang Irigasi dan Air Bersih sebanyak 63 buah; Bidang Politik sebanyak 13 buah; Bidang Hukum sebanyak 63 buah; dan Bidang Aparatur sebanyak 1.915 buah.

Pada periode Tahun 1999-2003 situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban relatif aman yang ditandai dengan berkurangnya kasus-kasus pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian masal, seperti tindakan anarkis dan terorisme. Kondisi ini tercipta karena terjalin keharmonisan, kerjasama, kepatuhan menjalankan tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing dari semua pihak pada setiap tingkatan pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis, sehingga memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Penciptaan kondisi ketentraman dan ketertiban berkaitan dengan konsistensi dalam penegakan hukum serta dihormatinya supremasi hukum oleh semua pihak dan kemampuan melakukan proses transformasi terhadap berbagai nilai global yang berkembang. Pembangunan bidang hukum dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban yang dihadapi di Kabupaten Ciamis selama ini adalah:

- a. Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat relatif masih rendah;
- b. Tindak kriminal dan pelanggaran hukum masih sering terjadi/cukup tinggi;
- c. Masih sering terjadi perubahan peraturan perUndang-Undangan tingkat pusat;
- d. Masih terdapat Peraturan Daerah yang perlu ditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan keadaan;
- e. Belum terbentuknya program legislasi daerah;
- f. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia bidang hukum;
- g. Penerapan hukum dirasakan masih diskriminatif;
- h. Rendahnya pemahaman tentang hukum dan peraturan yang berlaku;
- i. Penegakan supremasi hukum masih belum sesuai harapan;
- j. Masih terdapat image negatif bahwa di kalangan penegak hukum sendiri sering melakukan pelanggaran peraturan; dan
- k. Terbatasnya prasarana dan sarana di bidang penegakan hukum.

Sebagai gambaran umum berbagai peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran aturan, misalnya pelanggaran lalu lintas jalan, pelanggaran atas izin mendirikan bangunan, dan pelanggaran atas hak cipta. Pelanggaran hukum (angka kriminalitas) berdasarkan data kepolisian yang terjadi pada periode Tahun 1999 sampai dengan 2003 sejumlah 1.994 kasus. Kasus pelanggaran hukum (angka kriminalitas) tertinggi antara periode Tahun 1999-2003 adalah sebanyak 459 kasus pada Tahun 2000. Pada Tahun 2003 angka kriminalitas turun menjadi 239 kasus. Namun, pada Tahun berikutnya sampai dengan Tahun 2005 angka kriminalitas naik kembali menjadi 414 kasus.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan *good governance*, berbagai tindakan hukum dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur pemerintah daerah, di antaranya pemberian teguran tertulis dan sanksi kepada aparatur yang melanggar kode etik PNS yang berupa: penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji, sampai dengan pada pemberhentian dengan tidak hormat kepada PNS yang melanggar hukum.

3. Bidang Aparatur

Agenda reformasi telah mendorong munculnya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai salah satu jawaban terhadap persoalan krisis multidimensi. Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) merupakan landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ciamis sejalan dengan perkembangan peraturan perUndang-Undangan yang mengaturnya. Pada kurun waktu Tahun 1984-1998, penyelenggaraan pemerintahan berbasis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

yang menempatkan Kepala Daerah sebagai penguasa tunggal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah.

Selama melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Bupati menyandang sebagai administratur pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang sekaligus memiliki fungsi komando dengan pola manajemen pemerintahan yang bersifat struktural hirarkial. Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah secara konstitusional, kedudukan pemerintahan daerah bersifat *enheidstaat*, bukanlah pemerintahan yang berdiri sendiri.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada pemberian Otonomi Daerah yang luas dan bertanggung jawab sehingga daerah mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan seluruh potensi wilayah dan masyarakat untuk membangun kemandirian dan memiliki daya saing yang kuat dengan kabupaten/kota lain.

Dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah. Adapun komposisi jumlah jabatan struktural per eselon yang ada pada Pemerintah Kabupaten Ciamis, yaitu

- a. Eselon II terdiri dari 23 jabatan, yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Sekretaris DPRD.
- b. Eselon III terdiri dari 142 jabatan, yang terdiri dari Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Kantor dan Camat.
- c. Eselon IV terdiri dari 678 jabatan, yaitu Kepala Sub bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan, Lurah, Sekretaris pada Kecamatan dan Kelurahan, dan Kepala Tata Usaha pada SMK.
- d. Eselon V sebanyak 104 jabatan, yaitu Kepala Tata Usaha pada SMP dan SMA/SMK.

Jumlah aparatur Pemerintah Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2005 sebanyak 17.833 orang. Sebagian besar PNS di Kabupaten Ciamis mempunyai pangkat/golongan ruang dengan urutan Golongan I sebanyak 395 orang, Golongan II sebanyak 3.197 orang, golongan III sebanyak 10.529 orang dan golongan IV sebanyak 3.712 orang. Tingkat pendidikan aparatur sebagian besar berpendidikan D2 sebanyak 6.179 orang, pendidikan SD sebanyak 659 orang, SLTP sebanyak 507 orang, SLTA sebanyak 5.897 orang, D1 sebanyak 209 orang, D3 sebanyak 1.267 orang, D4 sebanyak 79 orang dan S1 sebanyak 2.789 orang dan S2 sebanyak 247.

2.2 TANTANGAN

2.2.1 BIDANG KEPENDUDUKAN, AGAMA, DAN SOSIAL BUDAYA

1. Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ciamis selama 10 tahun terakhir rata-rata sebesar 0.21%, dengan komposisi penduduk menurut kelompok umur sampai dengan Tahun 2025 diperkirakan tidak akan banyak berubah dengan kondisi saat ini. Kelompok umur usia produktif (15-64 Tahun) masih mendominasi dibandingkan dengan kelompok umur muda (0-14 Tahun) dan kelompok umur tua (65 Tahun ke atas). Sampai dengan Tahun 2005 *dependency ratio* mencapai angka 50,002, perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk produktif menanggung sebanyak 50 orang penduduk usia non-produktif.

Secara umum, penambahan jumlah penduduk Kabupaten Ciamis disebabkan oleh jumlah kelahiran yang ditambah jumlah penduduk yang datang lebih besar daripada jumlah kematian ditambah penduduk yang keluar. Kenaikan angka kelahiran hidup disebabkan oleh masih rendahnya usia perkawinan, yaitu rata-rata 18,22 Tahun dan *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,13. Sementara itu, penurunan angka kematian dan penurunan angka AKB/AKI di Kabupaten Ciamis merupakan indikator peningkatan Indeks Kesehatan.

Untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk Kabupaten Ciamis harus ditangani secara komprehensif dan berkesinambungan dengan penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan, sehingga peningkatan jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diharapkan mengalami perbaikan untuk pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk dalam menciptakan penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif.

Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antara kecamatan yang mempunyai perkembangan ekonomi tinggi dan kecamatan yang mempunyai perkembangan ekonomi rendah serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.

Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Ciamis yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2006 sebesar 71,05 termasuk angka yang masih rendah. Akan tetapi angka IPM ini terus mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan Tahun 2002 yang mencapai sebesar 69,70. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Ciamis mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian dalam lingkup lokal maupun regional dan nasional.

2. Agama

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang agamis, pembangunan agama diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan umat beragama melalui pendidikan dan dakwah agar kesadaran dan keyakinan keagamaan umat semakin meningkat, meningkatkan pengamalan agama secara menyeluruh baik tentang akidah yang bersih dari noda-noda syirik, syariah, maupun akhlak mulia sehingga terwujud kesalehan individu dan kesalehan sosial, menciptakan kerukunan hidup umat beragama, baik kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antar umat beragama, mengembangkan sarana dan lembaga keagamaan, meningkatkan pelayanan keagamaan dan partisipasi antar umat beragama pada proses pembangunan.

Pada saat ini, agama dituntut memiliki peran yang lebih fungsional, yaitu menjadikan agama sebagai sumber acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara nyata. Oleh karena itu, kehidupan beragama tidak hanya berlangsung di mesjid dan di gereja atau tempat ibadah lainnya tetapi agama harus hadir dalam seluruh proses kehidupan manusia. Agama memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Saat ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh agama khususnya di Kabupaten Ciamis, yaitu *Pertama*, disorientasi nilai dan degradasi moral. Agama cenderung dipahami secara legal formal sehingga agama dimanifestasikan dalam bentuk ritual formal yang lebih mementingkan bentuk daripada substansi (kualitas) sehingga beragama dipandang hanya di tempat beribadah, sedangkan dalam kegiatan keseharian ditinggalkan, bekerja tidak menampilkan hasil dengan kualitas terbaik, tidak menjalankan amanah dengan maksimal. Hal ini karena pengetahuan agama yang kurang memadai dan pemahaman agama yang tidak utuh. *Kedua*, agama menghadapi kecenderungan pluralitas pemahaman, yang menjadikan sulitnya menjalin persatuan dan kesatuan umat beragama. Bahkan terkadang memunculkan sikap eksklusif yang mengakibatkan konflik antar umat beragama dan di internal umat beragama.

Oleh karena itu, pembangunan bidang agama harus didorong untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi proses pengembangan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai agama di masyarakat. Tiga permasalahan di atas, yaitu disorientasi nilai yang ditandai dengan degradasi moral dan pluralitas pemahaman terhadap agama sebagai akibat latar belakang pendidikan dan pemahaman agama yang

kurang memadai serta terjadinya serangan abad informasi yang membawa dampak negatif dari budaya asing, perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Internalisasi nilai-nilai agama perlu didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan yang memadai sebagai prioritas pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis. Dalam kerangka pembangunan bidang agama di Kabupaten Ciamis, seluruh organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya bertanggung jawab untuk mengembangkan seluruh potensi umat beragama untuk menciptakan kondisi kehidupan beragama secara fungsional, profesional dan proporsional agar tercipta kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peningkatan kualitas dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan dasar masyarakat beragama dan sumber dana keumatan perlu dikelola secara sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang profesional, dan memberi prioritas bagi pemberdayaan potensi ekonomi umat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keagamaan yang dianut.

3. Kesehatan

Kondisi Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi merupakan permasalahan yang harus dihadapi serta diselesaikan secara komprehensif dan berkesinambungan. Aspek yang menimbulkan kondisi tersebut antara lain: kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya tenaga kesehatan; kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang aksesibilitas pelayanan kesehatan; belum optimalnya standarisasi pelayanan kesehatan; meningkatnya jumlah penduduk miskin; serta adanya perubahan pola hidup masyarakat yang mendukung terjadinya transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kasus penyakit degeneratif.

Selain itu, kondisi kesehatan lingkungan yang kurang mendukung serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat yang belum membudaya menjadi kendala yang cukup berat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya peningkatan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan memelihara kesehatannya serta mencegah resiko terjadinya penyakit.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), harus diimbangi dengan peningkatan pembiayaan dan profesionalisasi pelayanan kesehatan dan ditunjang oleh sistem perUndang-Undangan sehingga terwujud pelayanan prima. Strategi yang dijalankan yaitu membuat rakyat sehat serta mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Kedua strategi tersebut merupakan langkah nyata dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Ciamis sehat sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Sehat tahun 2010.

Keterbatasan tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan tantangan dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya-upaya yang mendukung peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat, yaitu peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung, dan peningkatan pelayanan kesehatan prima merupakan prioritas dalam pembangunan di bidang kesehatan.

4. Pendidikan

Kondisi Indeks Pendidikan Kabupaten Ciamis masih rendah. Aspek yang menjadi penyebab kondisi ini adalah karena keterbatasan pemahaman dan perekonomian masyarakat, rendahnya kesadaran dalam mengoptimalkan pendidikan sebagai upaya meningkatkan sumber daya dan potensi local, keterbatasan pengetahuan dan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan dengan menyediakan pelayanan pendidikan berkualitas, pendidikan dasar gratis (tidak memungut biaya operasional sekolah dari masyarakat), mendorong program penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mandiri dan profesional, mendorong pendirian SMP/MTs di wilayah yang memenuhi standar kelayakan pendirian.

Masalah pendidikan perlu didorong untuk mencapai sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdian pada masyarakat, dengan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi serta didasari oleh nilai-nilai religius. Hal tersebut mengandung makna, bahwa pembangunan pendidikan harus dilandasi oleh visi yang jelas, yaitu membawa pengaruh positif secara langsung terhadap pembangunan daerah.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah yang harus menjadi perhatian adalah *dropout* dan minat untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Pada saat ini telah terjadi pergeseran masyarakat yang berkuasa dari *capital society* (masyarakat pemilik modal) menjadi *knowledge society* (masyarakat berbasis ilmu pengetahuan). Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang akan menentukan maju dan mundurnya suatu daerah atau masyarakat. Oleh karena itu kualitas lulusan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus didasarkan pada kompetensi yang jelas untuk memudahkan proses jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau pada dunia kerja secara langsung. Selain itu, perlu didukung oleh tata kelola pendidikan yang profesional, pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, pengembangan kurikulum dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, pengembangan kompetensi kewirausahaan dan kemandirian, serta pemenuhan sarana prasarana yang sesuai dengan standar nasional.

Keberadaan perguruan tinggi di daerah perlu diberi peran secara optimal dalam membantu penyelenggaraan pembangunan di daerah sebagai kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Perguruan Tinggi yang memiliki tugas menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara Pemerintahan Kabupaten Ciamis dengan perguruan tinggi, baik secara kelembagaan maupun secara individual melalui pemanfaatan kekuatan intelektual (akademisi) untuk menjadi penopang dan penyeimbang (*balances*) dalam mewujudkan hasil pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu, yang menjadi tantangan bidang pendidikan adalah peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas akademik dan keahlian sebagai prioritas pembangunan bidang pendidikan yang dapat dijalin melalui kerjasama dengan perguruan tinggi.

Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara penduduk perkotaan dengan perdesaan, antar-jenis kelamin, dan antara penduduk kaya dengan miskin. Pembangunan bidang pendidikan harus diarahkan pada penyediaan pelayanan pendidikan prima, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah yang bebas biaya, menyediakan pendidikan sepanjang hayat (*life long education*), meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik, serta penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pengajar merupakan tantangan dalam pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan dasar akan mengalami kekurangan tenaga pengajar karena akan terjadi pensiun secara masal, seiring dengan masa pengangkatan masal berdasarkan kebijakan Pemerintah pusat pada saat itu. Selain itu, dalam bidang pendidikan dihadapkan pada tantangan perkembangan teknologi, informasi, dan kebutuhan serta perkembangan dunia usaha, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, kualitas manajemen penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan, keterbatasan kemampuan sumber pendanaan dari pendapatan asli daerah dan komitmen Pemerintah (eksekutif dan legislatif) untuk menganggarkan pendidikan 20% selain gaji dan kegiatan pendidikan di bidang lain, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan dalam bidang kualitas hidup serta peranan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah. Hal itu, antara lain karena pencitraan masyarakat terhadap makna "hidup berkualitas" yang keliru dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak masih kurang baik, kesejahteraan kurang memadai, partisipasi dan perlindungan anak belum optimal. Dengan demikian, tantangan dalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Tantangan pembangunan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Ciamis adalah menghilangkan diskriminasi peluang dalam kegiatan pembangunan, hukum, pendidikan dan status lain, memberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pekerjaan dan usaha, meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang hukum, HAM dan politik, meningkatkan kualitas perempuan dalam mengembangkan diri untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, menurunkan jumlah penduduk perempuan yang menderita tiga buta, meningkatkan kemandirian perempuan dalam peran ganda sesuai dengan kodratnya serta meningkatkan kualitas perempuan melalui pemanfaatan dan pengembangan hasil IPTEKS.

Selain itu, tantangan pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan interaksi sosial yang kondusif, mengarahkan kehidupan anggota masyarakat pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*Public Life*) dan kehidupan pribadi (*Individual Life*) dalam menciptakan keseimbangan hidup.

Sementara itu, tantangan di bidang pemuda dan olahraga adalah mengoptimalkan pemberdayaan dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, serta peningkatan prestasi olahraga.

6. Kesejahteraan Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Ciamis semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, menipisnya pengamalan nilai-nilai budaya dan agama, munculnya gejala sosial sebagai dampak dari disparitas kondisi ekonomi masyarakat, terjadinya bencana alam; dan sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, tantangan pembangunan bidang ini adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh upaya perubahan perilaku masyarakat, bantuan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat, lapangan kerja dan permodalan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penguasaan teknologi.

Perkembangan jumlah penduduk miskin sampai dengan tahun 2005 jumlahnya sebanyak 356.216 orang atau sekitar 23,51% dari jumlah penduduk Kabupaten Ciamis. Ini artinya perkembangan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh Kabupaten Ciamis tidak berpengaruh terhadap pengurangan penduduk miskin, walaupun pertumbuhan penduduk juga mengalami penurunan dari Tahun 2005 dibandingkan dengan Tahun 2006, yaitu dari 0,33% pada Tahun 2005.

Pemecahan masalah kemiskinan di Kabupaten Ciamis perlu didasarkan pada pemahaman masyarakat miskin dan adanya penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Tantangan yang dihadapi dalam pemecahan masalah kemiskinan di Kabupaten Ciamis antara lain : kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan Pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dan aksesibilitas dalam memanfaatkan potensi daerah untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan ekonomi.

Selain itu, tantangan bidang kesejahteraan sosial adalah kecenderungan perubahan gaya hidup masyarakat yang materialistis sehingga akan mendorong pula pada perubahan pola hidup yang konsumtif serta terbatasnya akses untuk memperoleh kesempatan kerja antara lain dalam penyerapan teknologi terapan, informasi, permodalan, dan kelembagaan.

7. Budaya

Upaya pembangunan jatidiri masyarakat Tatar Galuh sebagai modal pelaksanaan pembangunan masih perlu terus ditingkatkan, seperti budaya hidup bergotong-royong, kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, saling percaya dan rasa cinta tanah air yang dirasakan semakin terkikis. Hal tersebut, terjadi karena upaya pembentukan karakter daerah belum optimal, adanya penyerapan budaya global negatif yang memengaruhi budaya lokal, dan ketidak-merataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Kemajemukan budaya daerah merupakan aset daerah, sekaligus sebagai titik tolak perekat persatuan dan kesatuan dalam menciptakan masyarakat yang madani. Kondisi ini diharapkan dapat berkembang lebih optimal di masa yang akan datang untuk menjawab tantangan era reformasi dan globalisasi. Adapun tantangan pembangunan kebudayaan daerah adalah mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan leluhur yang sesuai dengan nilai agama, moral, etika dan estetika, mengembangkan dan memelihara kebudayaan daerah sebagai wahana kehidupan masyarakat dan menumbuhkembangkan nilai kesatuan dan persatuan, memelihara dan melestarikan situs budaya sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pariwisata.

Arus globalisasi yang sangat deras dengan didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa menjadi tantangan bagi masyarakat Kabupaten Ciamis untuk dapat mempertahankan jati diri kedaerahan, agamis, toleransi, santun, kegotong-royongan dan peningkatan daya saing, seperti nilai-nilai gotong-royong di kalangan masyarakat saat ini sudah menurun bersamaan juga dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya yang juga mengalami penurunan. Hal ini terbentuk karena pembangunan yang tidak menyentuh kondisi moral, sosial ekonomi masyarakat, serta konsep pemberdayaan masyarakat yang tidak terukur dan merata, di sisi lain adanya perubahan gaya hidup yang cenderung materialistis, sehingga mendorong pola hidup konsumtif menyebabkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah masih tinggi.

2.2.2 PEREKONOMIAN DAERAH

1. Pembangunan ekonomi Kabupaten Ciamis dalam sepuluh Tahun terakhir menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi per tahun yang masih relatif sedang, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap tahun sebesar 3,39 % per tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis yang fluktuatif sebagai dampak fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, menyebabkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis relatif rendah. Tantangan ke depan adalah mengupayakan strategi yang paling tepat agar pertumbuhan sektor pertanian dapat relatif stabil. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi adalah perlu ditetapkan suatu strategi mantap agar dapat meningkatkan perkembangan investasi di Kabupaten Ciamis yang sangat berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis yang diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar Rp. 636.494,00., atau setiap tahun meningkat sebesar 1,02%. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan daya beli masyarakat adalah menerapkan strategi yang tepat agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis mempunyai korelasi yang positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Di samping itu tantangan yang lainnya adalah strategi pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan investasi untuk menciptakan pemerataan peningkatan daya beli masyarakat.

3. Perkembangan jumlah pencari kerja di Kabupaten Ciamis antara Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2005 mencapai 231,40 % atau setiap tahunnya dibutuhkan rata-rata 631 lowongan pekerjaan. Dari data selama 10 tahun terakhir diketahui bahwa setiap kenaikan 1% Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Ciamis maka hanya mampu menyediakan 300 lowongan pekerjaan, sehingga untuk mengantisipasi pertambahan jumlah pencari kerja diperlukan adanya akselerasi peningkatan LPE dari berbagai sektor kegiatan atau setiap tahun LPE diharapkan naik di atas angka 3%. Selain itu, dalam rangka menurunkan angka pencari kerja perlu dibangun kerjasama jaringan ketenagakerjaan dengan melibatkan pihak swasta di tingkat regional dan nasional serta peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan.
4. Basis kekuatan ekonomi di Kabupaten Ciamis bertumpu pada sektor pertanian untuk masa depan perlu dipacu, sehingga menumbuhkan lapangan usaha ekonomi yang simultan terkait dengan pengembangan pertanian, antara lain agro industri, agro wisata, jasa, dan perdagangan terutama bagi wilayah yang mempunyai potensi/basis pengembangan usaha pertanian. Selain tantangan ke depan berupa luas ideal kepemilikan lahan pertanian bagi petani sebesar 0,8 Ha/KK, sedangkan untuk membangun keterpaduan pengembangan pertanian perlu dibangun komitmen bagi semua pihak dalam pengembangan agribisnis. Hal ini akan berdampak pada dukungan anggaran, fasilitas dan rekrutmen SDM yang berbasis spesifik pada setiap SKPD yang menjadi lembaga pembina agribisnis.
5. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Dengan pemahaman ini, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien dengan menerapkan praktek-praktek terbaik dalam prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin kebutuhan dasar.
6. Volume APBD Kabupaten Ciamis pada umumnya mengalami peningkatan setiap tahun. Namun demikian, yang menjadi tantangan adalah pengembangan sumber pendapatan daerah yang kreatif, inovatif, dan tidak memberatkan rakyat untuk mengatasi keterbatasan pendapatan daerah pada APBD yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3 SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG

1. Sumberdaya alam dan lingkungan merupakan suatu sistem yang sangat luas, kompleks, dinamis, serta berinteraksi satu sama lain. Apabila melakukan perubahan pada satu komponen dalam sistem, maka akan menimbulkan perubahan terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu, semakin intensif eksploitasi sumber daya alam akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Apabila eksploitasi sumber daya alam tersebut kurang memperhatikan aspek daya dukung dan kaidah konservasi, maka dimungkinkan akan menimbulkan menurunnya daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam serta terganggunya keseimbangan lingkungan. Isu lingkungan hidup yang menjadi tantangan pembangunan sumber daya alam di Kabupaten Ciamis adalah:
 - a. Perubahan dan pergeseran musim
 - b. Penjarahan atau perambahan hutan
 - c. Pencemaran lingkungan
 - d. Abrasi, sedimentasi, dan kerusakan sumber daya kelautan
 - e. Aktivitas penambangan liar
 - f. Sampah yang tidak terkelola dengan baik akibat manajemen persampahan yang lemah.
 - g. Bencana alam seperti longsor, banjir, angin ribut dan tsunami
2. Sistem pengelolaan limbah dan TPA merupakan salah satu indikator dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Akan tetapi keterbatasan sarana transportasi mengakibatkan layanan pengelolaan limbah khususnya sampah belum seluruhnya dapat terlayani. Selain itu, belum tumbuhnya kesadaran warga masyarakat untuk

mengembangkan sampah atau limbah menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. Oleh karena itu, tantangan pembangunan bidang lingkungan hidup adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat dan terbarukan untuk menjadi sebuah budaya hidup serta peningkatan kesadaran pengelolaan limbah mandiri.

3. Tantangan di bidang pengelolaan pertanahan di Kabupaten Ciamis adalah banyaknya Hak Guna Usaha (HGU) yang dilerantarkan serta masih terjadinya perebutan dalam pengelolaan tanah. Walaupun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ciamis relatif rendah, akan tetapi berdampak pada penyediaan tanah, sarana dan prasarana permukiman. Dengan demikian dibutuhkan penataan ruang yang dapat mengakomodasi perkembangan dinamika penduduk berupa tuntutan pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi.
4. Pelaksanaan kegiatan tata ruang dan pemanfaatan ruang dilaksanakan dalam rangka tersusunnya Rencana Tata Ruang Kecamatan, Kawasan Tertentu, dan Rencana Detail Tata Ruang sehingga kondisi lingkungan semakin membaik dan tertanganinya masalah-masalah yang berkaitan dengan ruang/lahan serta pemekaran wilayah, selain itu juga dengan adanya kegiatan penataan ruang kepastian lahan bagi kegiatan pelaku/usaha dapat lebih terjamin. Tantangan yang dihadapi kegiatan penataan ruang di Kabupaten Ciamis adalah terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang disesuaikan dengan potensi wilayah daerah; keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan skala pelayanan; menjamin keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup dengan pengaturan dan pengendalian kawasan lindung dan kawasan budi daya serta adanya jaminan kepada para investor dengan memberikan arahan alokasi ruang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah; dan meminimalkan bencana dan dampak lingkungan lainnya dengan pengendalian tata ruang, dan pengendalian lingkungan, serta Rencana tata ruang yang disusun sampai tingkat RTBL dalam skala 1:1000.

2.2.4 INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Air Bersih dan Irigasi

Secara umum penyediaan air bersih di Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum, tetapi saluran air PDAM hanya terbatas di wilayah perkotaan. Oleh karena, bagi masyarakat di perdesaan penyediaan sumber air bersih diperoleh dari sumur gali, sumber mata air, dan air sungai. Tantangan penyediaan air bersih di beberapa wilayah perdesaan sangat dipengaruhi dari musim, sehingga pada musim kemarau banyak warga masyarakat yang kesulitan dalam penyediaan air bersih.

Selain itu, tantangan bidang penyediaan air bersih adalah masih ada warga masyarakat yang memanfaatkan aliran sungai sebagai tempat MCK yang tidak sesuai dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Keterbatasan sumber air bersih ini merupakan salah satu indikator yang menyebabkan sulitnya mempromosikan program perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan demikian penyediaan sarana air bersih harus menjadi prioritas dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat yang sehat.

Ketersediaan irigasi menjadi tantangan pembangunan bidang pertanian terutama dalam mempertahankan Kabupaten Ciamis sebagai salah satu lumbung padi Jawa Barat. Pengembangan produksi hasil pertanian diarahkan pada pengembangan dan pemanfaatan areal tanaman padi terutama tanaman padi sawah. Dengan demikian tantangan ke depan adalah mempertahankan penyediaan sumber air dan peningkatan kualitas irigasi secara kontinyu, sehingga selama periode 20 tahun ke depan pertanian sawah sudah didukung seluruhnya oleh penyediaan irigasi teknis.

2. Transportasi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan transportasi yaitu penurunan kualitas jalan yang ditunjukkan oleh kondisi jalan yang rusak ringan sebesar 337.040 km dan rusak berat sebesar 309.225 km pada Tahun 2005, tidak berfungsinya kereta api jalur Banjar-

Cijulang sedangkan di sisi lain jalur KA tersebut merupakan aset, belum dioptimalkannya stasiun KA di Kabupaten Ciamis untuk lintas KA Eksekutif, belum optimalnya pemanfaatan dermaga Ferry Majingklak, belum optimalnya Bandara Nusawiru bagi kegiatan transportasi udara, masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas dan *traffic light*.

Solusi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi sampai di perdesaaan, meningkatkan layanan sarana transportasi baik di perkotaan maupun di perdesaan, pengembangan fasilitas pendukung sarana transportasi terutama di wilayah yang terisolir dan wilayah perbatasan.

Tantangan pembangunan transportasi untuk mendukung pengembangan kegiatan perekonomian dan kemasayarakatan adalah peningkatkan kualitas jalan/status jalan yang memberikan kemudahan akses bagi pengembangan simpul-simpul kegiatan ekonomi masyarakat dan menunjang pengembangan iklim investasi.

Berdasarkan analisis dan permasalahan yang ada, maka tantangan untuk 20 tahun ke depan dapat diproyeksikan sebagai berikut: dibangunnya jalur jalan Ciamis-Majalengka (ke lokasi rencana Bandara Internasional di Jawa Barat); dibangunnya jalan Lingkar Utara ibukota; Pengaktifan jalur jalan Lingkar Selatan ibukota; peningkatan kualitas jalan; Rencana tata ruang disusun sampai tingkat RTBL dalam skala 1:1000; dibangunnya terminal terpadu tipe B dengan fasilitas tipe A di Imbanagara; dibangunnya jalan tol Banjar-Ciamis-Bandung; Optimalisasi Bandara Nusawiru; dan Optimalisasi Dermaga Penyebrangan Majingklak.

2.2.5 BIDANG PEMERINTAHAN

1. Bidang Politik

Perumusan kebijakan publik dan pembangunan pusat dan daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi. Dalam demokrasi rakyat dapat secara aktif menyuarakan aspirasinya. Keputusan-keputusan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasayarakatan di daerah diambil oleh pihak eksekutif maupun legislatif dan keputusan kedua lembaga tersebut didasarkan pada konsensus. Kebijakan publik yang diputuskan merupakan hasil keputusan bersama.

Tantangan perubahan yang akan dihadapi dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan di Kabupaten Ciamis yaitu diperlukannya kualifikasi pemimpin daerah dan para wakil rakyat yang dipilih melalui proses demokrasi memiliki pengalaman pengelolaan manajemen Pemerintahan, memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual untuk menggerakkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan aparatur Pemerintahan yang inovatif dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan visioner untuk menggerakkan proses demokratisasi yang beradab dan bemuara pada terciptanya kondisi yang harmonis.

Proses pergantian kepemimpinan daerah juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan gender untuk mencapai keseimbangan antara ketegasan dan kecepatan serta kecermatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.

Proses dan mekanisme politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi di masa mendatang adalah untuk menciptakan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, damai dan stabil. Karena itu, partisipasi warga dalam kehidupan politik merupakan suatu keharusan dalam lingkungan masyarakat madani yang egaliter dan terbuka terhadap perubahan. Tantangan pembangunan dalam bidang politik di Kabupaten Ciamis adalah:

- a. Penyempurnaan struktur politik yang dapat dilakukan dengan cara : merumuskan konsep kebijakan politik yang dapat diterima oleh semua pihak dalam kehidupan bermasyarakat; merumuskan standar kinerja lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan; membuat peta politik (*political roadmap*) dan memfasilitasi upaya-upaya politik untuk lebih memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; menciptakan kebijakan publik mengenai berbagai aspek kelembagaan dan keberlanjutan proses rekonsiliasi secara musyawarah; menciptakan pelembagaan lebih lanjut untuk mendukung berlangsungnya kehidupan demokrasi secara berkelanjutan.

- b. Peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat yang dapat ditata dengan cara : Peningkatan kemandirian dan kedewasaan politik masyarakat, bersamaan dengan peningkatan keahlian dan profesionalisme; mewujudkan pemahaman baru mengenai pentingnya Organisasi masyarakat dan organisasi politik sebagai mitra pemerintah daerah; memfasilitasi peningkatan fungsi-fungsi tradisional dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum, dan lembaga politik, untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang merusak; dan memperbanyak alternatif politik dan birokrasi bagi masyarakat agar makin terakomodasikan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan-keputusan publik yang langsung berhubungan dengan hajat hidupnya.
- c. Pengembangan budaya politik yang dapat dilaksanakan dengan cara menciptakan kebhinekatunggalikaan dalam berbudaya dan penanaman nilai-nilai politik yang demokratis seperti penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi politik.
- d. Peningkatan proses politik yang dapat dilakukan dengan cara : Memperbaharui standar dan parameter bagi berlangsungnya proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para calon pemimpin daerah; Memperbaharui standar dan parameter bagi berlangsungnya proses dan mekanisme rekrutmen pejabat politik dan publik yang lebih transparan; Memantapkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat bagi setiap warga negara.
- e. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi dalam politik yang dapat dilakukan dengan cara: mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan Pemerintahan daerah secara cerdas dan demokratis; Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa daerah yang independen; Mewujudkan deregulasi perijinan dalam bidang penyiaran (*broadcasting*) sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi dan mencegah monopoli informasi; Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik, untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh jaringan informasi yang ada di pelosok daerah sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa; dan, Memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat luar supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan Kabupaten Ciamis pada posisi teknis dan ekonomis yang menyulitkan. Penyelenggaraan proses komunikasi massa, komunikasi sosial, dan komunikasi politik yang berorientasi pada penyelenggaraan proses demokratisasi yang harmonis. Pembangunan bidang komunikasi dan informasi tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kualitas pemahaman terhadap fungsi kelembagaan dan media komunikasi. Secara fungsional, kelembagaan dan media komunikasi merupakan bagian integral dari keseluruhan masyarakat, dan karena itu tunduk terhadap dimensi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat baik menyangkut aspek moral maupun aspek lainnya yang berhubungan dengan penguatan masyarakat di seluruh aspek kehidupan dan pembangunan.
- f. Peningkatan peranan aparatur pemerintahan daerah dalam proses sosialisasi politik dengan cara: penyebaran informasi mengenai peraturan perUndang-Undang sebagai perwujudan kebijakan pemerintah.
- g. Demikian pula kebebasan pers sangat luas, dan kemunculan berbagai lembaga penyiaran dan penerbitan. Unjuk rasa menjadi model yang kerap dipilih oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara reaktif terhadap berbagai perkembangan politik nasional, kebijakan pemerintah dalam pembangunan, dan bahkan kebijakan internal di lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat masing-masing. Menampung, mengolah dan menyalurkan aspirasi kepentingan masyarakat dengan cara: Mengadakan komunikasi politik yang intensif baik secara internal maupun eksternal.

- h. Munculnya keinginan masyarakat Kabupaten Ciamis bagian Selatan untuk berpisah dengan kabupaten induknya merupakan tantangan yang harus dihargai sebagai aspirasi masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pembangunan politik untuk melakukan kajian mendasar secara intensif tentang alasan-alasan yang mendasari hal itu, kecenderungan pemenuhan standar kelayakan untuk menjadi daerah mandiri, sehingga arah kehendak politik masyarakat tidak berbenturan dengan pembangunan politik di Kabupaten Ciamis secara umum.
- i. Dalam menciptakan keharmonisan kehidupan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat diarahkan pada menciptakan stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan melakukan antisipasi terhadap tindakan yang akan menimbulkan aktivitas anarkisme yang disebabkan sekulerisme dan penyebaran ideologi baru. Selain itu juga, adanya upaya antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya bencana alam gerakan tanah dan banjir.

2. Bidang Hukum

Pada periode 20 tahun kedepan diharapkan pembangunan bidang hukum di Kabupaten Ciamis lebih mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Hal ini dapat menunjang kelancaran pembangunan pada bidang lainnya. Tantangan pembangunan bidang hukum yang akan dihadapi dan harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sistem hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran.
- b. Pembangunan hukum yang diarahkan pada upaya mewujudkan sistem hukum yang mantap yang mampu berfungsi, baik sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana untuk melakukan pembangunan, melalui program legislasi daerah.
- c. Pembentukan materi produk hukum daerah yang mencerminkan nilai-nilai sosial budaya dan kepentingan masyarakat serta dapat mewujudkan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan dan penghargaan kepada hukum.
- d. Pembentukan produk hukum daerah yang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum, perlindungan hak asasi manusia yang berintikan keadilan dan kebenaran, mampu menumbuhkembangkan disiplin bersama, kepatuhan dan penghargaan kepada hukum, serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspirasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, baik rancangan maupun sesudah definitif.
- e. Pemantapan kelembagaan hukum meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum, yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi PPNS dan satuan polisi pamong praja dalam menegakan peraturan daerah. Dan juga pemanfaatan lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka menciptakan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat, melalui peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi masalah hukum di daerah.
- f. Mewujudkan masyarakat hukum dengan melakukan :
 - Penyuluhan hukum secara intensif terhadap peraturan perUndang-Undangan tingkat pusat dan daerah yang telah ada terhadap berbagai kalangan dalam masyarakat;
 - Sosialisasi rancangan produk hukum daerah dan sosialisasi produk hukum daerah secara terpadu dan berkesinambungan kepada masyarakat;
 - Melakukan evaluasi, integrasi dan sinkronisasi serta penyempurnaan atas produk hukum daerah atas peraturan yang lebih baru dan lebih tinggi;
 - Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada di daerah;
 - Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu;
 - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bidang hukum;
 - Penerapan dan pelayanan hukum secara adil sehingga mampu mewedahi dinamika sosial dan menunjang pembangunan;
 - Penegakan hukum yang tegas dan manusiawi untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pertumbuhan kriminalitas yang disebabkan masih besarnya angka pengangguran dan belum seimbangnya antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya masalah keamanan di masyarakat. Dengan demikian upaya penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib dapat diciptakan dengan pengembangan motivasi hidup disiplin dan membuka peluang akses penyaluran tenaga kerja yang disesuaikan dengan peningkatan jumlah pencari kerja atau angkatan kerja. Tantangan pembangunan ketentraman dan ketertiban adalah:

- a. Terbangunnya aparat keamanan dan ketertiban yang profesional sebagai tanggung jawab dan pelaksana inti fungsi ketentraman dan ketertiban pada masyarakat yang mampu mendukung dan menyesuaikan terhadap tuntutan yang berkembang di masyarakat.
- b. Terwujudnya kekuatan, kesadaran, serta komitmen pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- c. Tercapainya tingkat kemampuan aparat secara cukup memadai dilihat dari aspek kualitas dan kuantitas.

3. Bidang Aparatur

Bertolak dari pengalaman empirik penyelenggaraan pemerintahan, kelemahan yang dihadapi adalah struktur lembaga pemerintah daerah masih cukup besar, aparatur yang belum didayagunakan secara optimal, pengembangan kompetensi aparatur yang belum optimal, serta pelayanan publik masih belum memuaskan. Dalam pemberdayaan aparatur permasalahan yang dihadapi adalah belum berlangsungnya proses perencanaan karier sesuai dengan kebutuhan organisasi dan manajemen pemerintahan, belum optimalnya analisis terhadap beban kerja aparatur pemerintah, masih rendah kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah daerah, dan pola mutasi berbasis promosi dan pertukaran antar fungsi untuk memperkaya pengalaman aparatur masih terkendala oleh proses regenerasi yang lambat. Dalam situasi demikian, proses pengembangan karier aparatur masih dipengaruhi oleh berbagai keputusan politis, penilaian subjektif, dan nepotisme.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menjadi fondasi penting di dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yang tentu kemudian hasilnya dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan pembangunan daerah. Selain itu keberhasilan pembangunan daerah menentukan keberhasilan pembangunan nasional.

Salah satu kunci penting keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan Pemerintah daerah yang dikepalai oleh Kepala Daerah di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, tantangan ke depan dalam meningkat kualitas pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah adalah kemampuan melakukan pengelolaan pemerintahan daerah secara profesional dan handal, serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan. Kemampuan mengelola pemerintahan di daerah termasuk di dalamnya adalah kemampuan mengelola potensi sumberdaya alam, keuangan negara, pengoptimalan peran birokrasi pemerintah secara profesional dan netral, melakukan kerjasama kemitraan dengan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (swasta)

Dalam upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Ciamis perlu didukung oleh ketersediaan aparatur pemerintah yang memadai dilihat dari kualitas dan kuantitas. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan administrasi daerah dapat dicapai dengan cara:

- a. Penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur agar sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. Penataan fungsi-fungsi lembaga pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, ramping, luwes, dan responsif;
- c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat;
- d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan kompetensi dan prestasi.

- e. Peningkatan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi (TI) yang akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah serta akan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.
- f. Memperkuat perubahan paradigma pembangunan yang berorientasi potensi lokal kedaerahan yang mendukung program-program pembangunan nasional.
- g. Peningkatan jumlah aparatur Pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang dapat dicapai dengan cara:

- a. Penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;
- b. Pemberian sanksi secara tegas dan seberat-beratnya kepada pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur pemerintahan daerah melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat;
- d. Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara Pemerintahan terhadap prinsip-prinsip *good governance*.

Peningkatan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang dapat dicapai dengan cara:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mandiri, berpartisipasi dalam proses pembangunan;
- c. Partisipasi aktif dalam pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan sebagai kontrol sosial yang efektif.

2.3 MODAL DASAR

Untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Ciamis 20 Tahun ke depan diperlukan sumber kekuatan yang efektif dan potensial yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sebagai modal pembangunan, antara lain:

1. Wilayah Kabupaten Ciamis mempunyai luas sebesar 244.479 Ha, dengan topografi yang beragam dan sangat menguntungkan karena berbagai potensi lahan yaitu lahan basah, lahan kering, pantai dan sumberdaya yang terkandung di dalam lahan tersebut. Penggunaan lahan daratan untuk kegiatan pertanian sebesar 205.849 Ha atau 84,20 % dari seluruh luas daratan Kabupaten Ciamis. Selain itu Kabupaten Ciamis mempunyai panjang garis pantai 91 Km dengan luas wilayah pantai sebesar 67.340 Km² yang memberikan potensi kelautan. Kondisi geografis kabupaten ini penting untuk disadari karena akan menjadi kekuatan yang akan memberikan peluang bagi Pemerintah dan seluruh masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah.
2. Mayoritas jumlah penduduk berusia produktif, dan merupakan kekuatan sekaligus tantangan bagi pembangunan. Oleh karena itu kebijakan di bidang peningkatan sumberdaya manusia sangat penting untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang mempunyai daya saing, mandiri, serta mampu menerapkan IPTEKS untuk kesejahteraan kehidupan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.
3. Secara umum karakteristik masyarakat Kabupaten Ciamis adalah masyarakat yang bermoralitas tinggi, agamis, mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi, dan kekuatan primordial. Di samping itu karena nuansa perdesaan masih cukup kuat, maka budaya gotong royong, toleran dan saling percaya sangat kental dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, keseluruhan kondisi ini adalah modal sosial yang merupakan sumberdaya potensial yang produktif untuk memperkuat akselerasi pelaksanaan pembangunan.

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2005 - 2025

3.1 VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi Kabupaten Ciamis merupakan cita-cita bersama selama rentang waktu 20 tahun ke depan, yang dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi objektif dan potensi yang dimiliki daerah. Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 adalah:

**“Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju,
Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025”**

Dengan Iman dan Taqwa bermakna bahwa **“Keimanan dan Ketaqwaan”** (yakni: berkeyakinan kuat bahwa tiada TUHAN kecuali ALLAH dalam menjalani hidup dan kehidupan selalu berpegang pada ajaran agama secara konsekuen) harus melandasi dan menjiwai seluruh perilaku aparaturnya pemerintahan dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Maju bermakna suatu kondisi yang dicapai untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya dan kesetaraan dengan daerah lain, dilihat dari indikator sosial yaitu pendidikan, kesehatan, kualitas pelayanan sosial; indikator ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan kualitas, pendapatan perkapita, daya beli, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Mandiri bermakna suatu kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan kemasyarakatan berdasarkan potensi yang ada di daerah, sehingga mampu menciptakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendorong peran serta “stakeholder” dalam pembangunan. Demikian pula masyarakat dapat memberdayakan potensi diri sehingga mampu mengurangi ketergantungan kepada pihak lain dan berperan aktif sebagai mitra pemerintah.

Sejahtera bermakna suatu kondisi masyarakat yang ditandai oleh kehidupan beragama yang mantap, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak, lingkungan yang sehat, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memiliki rasa aman dan tenang.

3.2 MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN CIAMIS

Untuk mewujudkan visi sebagaimana di atas, maka misi pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran komoditas daerah.

Makna yang terkandung dalam Misi Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa, dan Berakhlak Mulia

Makna yang terkandung dalam misi kesatu adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, pengamalan agama, keterampilan, sikap mental aparaturnya dan masyarakat melalui pendidikan formal, non formal, informal sejalan dengan perkembangan IPTEKS yang dilandasi iman dan taqwa serta memiliki kompetensi dan profesional yang didukung oleh peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

Makna yang terkandung dalam misi kedua adalah terselenggaranya suatu fasilitasi, regulasi, dan supervisi dari pemerintah yang profesional, ditandai dengan penyelenggaraan

pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, adil dan bertanggung jawab, transparan, demokratis, efektif, dan efisien dengan dukungan masyarakat secara luas didorong dengan semangat kebersamaan dan kesalehan sosial, mampu menegakkan supremasi hukum serta dapat menjamin kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

Makna yang terkandung dalam misi ketiga adalah bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbaharui, merupakan modal pembangunan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan sehingga penggalian, pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara optimal untuk menjamin peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah yang diikuti dengan upaya penataan, rehabilitasi, konservasi dan perlindungan guna menjamin ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan di masa yang akan datang.

4. Meningkatkan Produksi, Produktivitas, Kualitas, Nilai Tambah, dan Pemasaran Komoditas Daerah

Makna yang terkandung dalam misi keempat adalah upaya untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi melalui peningkatan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran produksi komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, pariwisata, transportasi, industri dan pertambangan yang didukung infrastruktur memadai dan pusat kajian sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli secara merata untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

BAB IV
ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005-2025

Tujuan pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ciamis adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Ciamis yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui berbagai upaya yang berlandaskan pada keimanan dan ketaqwaan. Untuk mencapai hal ini ditetapkan tahapan pencapaian tujuan pembangunan tersebut.

4.1 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN

Sebagai ukuran tercapainya tujuan tersebut untuk 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai agama dalam bentuk peningkatan keimanan, ketaqwaan, dan ahlak mulia masyarakat.
 - b. Semakin mantapnya perilaku aparat dan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
 - c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesional, berpengetahuan dan berwawasan, mampu menerapkan IPTEKS terutama yang bersifat terapan serta mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi.
 - d. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, pengembangan sarana dan prasarana sehingga tercipta masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat.
 - e. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan mengembangkan kemandirian, keuletan dan kemitraan.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, ditandai dengan :
 - a. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, diwujudkan dengan sosok dan perilaku aparatur yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.
 - b. Terciptanya kemandirian Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya kemampuan keuangan daerah, yang didukung oleh semakin besar peran pendapatan daerah, semakin efektif dan efisien belanja daerah untuk pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah secara profesional yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku.
 - c. Terwujudnya manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut, dan adil bagi seluruh masyarakat.
 - d. Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia, menghargai adanya perbedaan pendapat dalam kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, semakin mantapnya kekhasan budaya daerah untuk menguatkan kepribadian pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ciamis yang didukung oleh produk hukum daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan, ditandai dengan:
 - a. Tertata, terpelihara dan terlindunginya ketersediaan sumber daya alam yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 - b. Tergali, terkelola dan termanfaatkannya sumber daya alam secara optimal melalui pengelolaan lingkungan yang serasi, seimbang dan lestari untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi guna membangun struktur perekonomian yang tangguh,

prasarana dasar permukiman dan memiliki keunggulan kompetitif, melalui pendekatan keseimbangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

4. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, dan pemasaran komoditas daerah, ditandai dengan :
 - a. Terciptanya efisiensi penggunaan sumber daya produksi yang menguntungkan pelaku usaha, produksi yang tinggi baik kuantitas maupun kualitas, perubahan bahan baku menjadi barang hasil olahan, arus barang ke luar pasar lokal yang tinggi diikuti dengan semakin berkurangnya arus barang sejenis masuk ke pasar lokal.
 - b. Terbangunnya struktur perekonomian yang tangguh berbasis pada bisnis unggulan (*core bussiness*) yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata, serta pertambangan dan energi sebagai motor penggerak dan didukung oleh kegiatan sektor lainnya yang menghasilkan produk yang terpasarkan (*marketable*) dan berkelanjutan.
 - c. Tercapainya pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan daya beli masyarakat yang tinggi.
 - d. Meningkatnya investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kesempatan berusaha.
 - e. Tersedianya produk pangan yang cukup, bermutu, aman, serta memiliki nilai ekonomi yang kompetitif.
 - f. Terbangunnya komitmen, kerjasama dengan pelaku usaha/investor dalam rangka memberdayakan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
 - g. Terbangunnya jaringan informasi sebagai pusat pengembangan informasi potensi Kabupaten Ciamis.
 - h. Terbangunnya jaringan transportasi, irigasi dan infrastruktur wilayah lainnya yang representatif sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

4.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

4.2.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman bertaqwa dan berakhlak mulia

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai agama dalam bentuk peningkatan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia masyarakat, diarahkan untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas kelembagaan pendidikan agama dan keagamaan dalam pengembangan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama yang didukung dengan kualitas sumberdaya pengelola, kesejahteraan, dan prasarana keagamaan yang memadai.
 - b. Meningkatkan pendidikan agama dan keagamaan secara terstruktur, berjenjang dan sistemik
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.
2. Menciptakan perilaku aparat dan masyarakat yang semakin mantap dengan menerapkan nilai-nilai agama dalam pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, diarahkan untuk:
 - a. Meningkatkan peran aparat daerah dengan menitikberatkan pada kemandirian bidang social, ekonomi dan budaya serta meningkatkan peran positif dari lembaga kemasyarakatan, adat, dan lembaga-lembaga lain untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi daerah.
 - b. Memantapkan jati diri aparat dan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama serta mewujudkan sistem sosial yang berakar pada budaya dan kekhasan daerah.
 - c. Pemantapan fungsi dan peran agama guna membentuk akhlak mulia dan budi pekerti luhur sebagai kekuatan pendorong dalam mencapai kemajuan daerah

dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesional, berpengetahuan dan berwawasan, mampu menerapkan IPTEKS terutama yang bersifat terapan serta mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi, diarahkan untuk:
 - a. Mewujudkan komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap kualitas pendidikan dasar dan menengah, pendidikan kejuruan, penyediaan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial dan ekonomi pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - b. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia dalam memanfaatkan potensi daerah melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lapangan kerja serta diimbangi dengan peningkatan dan penguatan peranan IPTEKS dan riset.
 - c. Mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan mandiri sehingga produktif dalam memperoleh kesempatan kerja di tingkat regional, nasional dan internasional.
 - d. Mengembangkan budaya inovatif yang berorientasi IPTEKS melalui peningkatan penghargaan masyarakat terhadap IPTEKS, mengembangkan budaya membaca dan menulis, mengembangkan masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif.
4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, pengembangan sarana dan prasarana sehingga terciptanya masyarakat yang bersih dan sehat, diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang lebih berkualitas yang didukung oleh tenaga yang profesional dan sarana prasarana kesehatan yang memadai.
 - b. Meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat, terutama bagi penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin.
 - c. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas; pengaturan administrasi kependudukan; dan mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.
5. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial serta peran pemuda dalam pembangunan dengan mengembangkan kemandirian, keuletan dan kemitraan yang diarahkan untuk:
 - a. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
 - b. Meningkatkan pemberdayaan pemuda yang berwawasan kebangsaan untuk pembangunan.

4.2.2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik

1. Menciptakan tata Pemerintahan yang baik, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku aparatur yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab, sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada seluruh masyarakat yang diarahkan untuk:
 - a. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan.

- c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat oleh penyelenggara Pemerintahan.
- 2. Menciptakan kemandirian Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya volume keuangan daerah, yang di dukung oleh semakin besarnya pendapatan daerah, semakin efektif dan efisiennya belanja daerah untuk pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Diarahkan untuk : meningkatkan volume keuangan daerah, semakin efektif dan efisiennya belanja daerah untuk pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- 3. Mewujudkan pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut, dan adil bagi seluruh masyarakat. Diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan mutu, produktivitas di bidang pelayanan umum dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Pemberdayaan desa tertinggal dan desa di wilayah perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan daerah.
- 4. Menegakan supremasi hukum dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam berbagai kehidupan, menghargai adanya perbedaan pendapat dalam kegiatan Pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, semakin mantapnya kekhasan budaya daerah guna menguatkan kepribadian aparaturnya dan masyarakat Kabupaten Ciamis. Diarahkan untuk : menciptakan supremasi hukum dengan meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan HAM untuk tegaknya kebenaran dan keadilan dalam kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

4.2.3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berwawasan Lingkungan

- 1. Menciptakan penataan, pemeliharaan dan perlindungan terhadap ketersediaan sumber daya alam yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Arah pembangunan ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan penguatan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dalam upaya menata, merehabilitasi, mengkonservasi dan memulihkan daya dukung lingkungan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan, serta mencadangkan sumber daya alam guna kepentingan kehidupan generasi mendatang.
- 2. Menciptakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penataan lingkungan yang lestari, serasi dan seimbang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun struktur perekonomian yang tangguh, serta meningkatkan kondisi sosial politik yang kondusif, melalui pendekatan keseimbangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, yang diarahkan untuk :
 - a. Mengelola dan mendayagunakan sumber daya alam secara bijaksana, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui.
 - b. Memperkuat perencanaan penataan ruang yang lebih menyeluruh dan detail dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian fungsi ruang untuk kesejahteraan masyarakat.
 - c. Memperkuat perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan keselarasan terhadap tata ruang dan keseimbangan lingkungan melalui diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam.

4.2.4 Meningkatkan Produksi, Produktivitas, Kualitas, Nilai Tambah, dan Pemasaran Komoditas Daerah

- 1. Menciptakan efisiensi penggunaan sumber daya produksi yang menguntungkan pelaku usaha, produksi yang tinggi baik kuantitas maupun kualitas, perubahan bahan baku menjadi barang hasil olahan, arus barang ke luar pasar lokal yang tinggi diikuti dengan semakin berkurangnya arus barang sejenis masuk ke pasar lokal. Arah pembangunan

ini untuk meningkatkan pembangunan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan kehutanan melalui pemantapan sistem agribisnis dari mulai sub sistem sarana prasarana, sub sistem penelitian, pengembangan dan budidaya, sub sistem pengolahan hasil, sub sistem pemasaran dan sub sistem penunjang berupa jalan, jembatan dan pengairan yang memadai.

2. Menciptakan struktur perekonomian yang tangguh berbasis pada bisnis unggulan (*core bussiness*) yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata, pertambangan dan energi serta didukung oleh kegiatan sektor lainnya yang menghasilkan produk secara *marketable* dan berkelanjutan. Arah pembangunan ini untuk meningkatkan pembangunan perindustrian melalui pengembangan industri yang berbasis pertanian terutama dalam mendukung pengembangan agribisnis.
3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat yang tinggi, diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan melalui pelestarian dan aktualisasi seni dan budaya, penataan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan promosi kepariwisataan.
 - b. Meningkatkan pembangunan kelautan melalui optimalisasi zona penangkapan ikan, pelestarian sumber daya kelautan, pengembangan armada dan alat tangkap, optimalisasi PPI/TPI, serta pengolahan dan pemasaran hasil.
 - c. Meningkatkan pembangunan pertambangan melalui eksploitasi bahan tambang/mineral dan galian unggulan secara bijaksana dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan investasi, penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha. Pembangunan ini diarahkan untuk mengembangkan investasi melalui penciptaan iklim investasi yang menarik dengan penyederhanaan prosedur investasi, pemberian insentif bagi calon investor, pengembangan kelembagaan usaha, penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung investasi.
5. Tersedianya produk pangan yang cukup, bermutu, aman, serta memiliki nilai ekonomi yang kompetitif, yang diarahkan untuk:
 - a. Pengembangan keanekaragaman produk pangan lokal yang dapat mencukupi kebutuhan pangan, pendistribusian pangan secara merata dan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat serta dapat bersaing dengan produk pangan daerah lain.
 - b. Terciptanya kestabilan harga pangan melalui pengembangan lumbung pangan.
6. Terbangunnya komitmen, kerjasama dengan pelaku usaha/investor dalam rangka memberdayakan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Arah pembangunan ini untuk menciptakan kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta dan lembaga keuangan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah, serta kemitraan dalam pembangunan sarana dan prasarana publik.
7. Terbangunnya jaringan informasi sebagai pusat pengembangan informasi potensi Kabupaten Ciamis. Arah pembangunan ini untuk mempromosikan potensi komoditi dan investasi daerah, terfasilitasinya transfer teknologi dalam pengelolaan potensi daerah, serta pengembangan dan peningkatan informasi pemasaran produk dan investasi daerah.
8. Terbangunnya jaringan transportasi, irigasi dan infrastruktur wilayah lainnya yang representatif sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Arah pembangunan ini untuk membangun jalan-jalan poros daerah-daerah terisolir, infrastruktur perbatasan, serta jalan-jalan di lokasi desa tertinggal; terbangunnya irigasi pedesaan yang mendukung tumbuhnya perekonomian masyarakat; terbangunnya sarana dan prasarana sentra-sentra produksi yang berbasis komoditi unggulan.

4.3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005 - 2025

Dalam mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang dibutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan dijadikan sebagai agenda rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis disusun seperti berikut :

4.3.1. RPJMD Kesatu (2005-2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJMD kesatu diarahkan pada dua *core bussines* yang diwujudkan pada Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 dengan rumusan sebagai berikut "*Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Terdepan dalam Agribisnis dan Pariwisata di Priangan Tahun 2009*" dalam Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009. Visi Kabupaten Ciamis tersebut merupakan hasil kristalisasi dari gagasan ideal yang diinginkan dengan bertumpu pada kondisi obyektif dan potensi yang ada di Kabupaten Ciamis yang dilatarbelakangi :

- Kondisi sosial budaya masyarakat Ciamis yang agamis, partisipatif, kebersamaan, santun, kaya akan budaya tradisional serta kesalehan sosial.
- Kegiatan perekonomian mayoritas masyarakat bergerak di bidang pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan) serta kegiatan kepariwisataan yang sampai saat ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Ciamis.
- Potensi sumber daya alam yang meliputi sumber daya lahan, sumber daya perairan, sumber daya hutan, iklim, letak geografis sangat mendukung terhadap pengembangan agribisnis dan pariwisata.
- Sarana dan prasarana yang telah tersedia meliputi jaringan jalan, pelabuhan udara, dermaga penyeberangan, jaringan irigasi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, bank dan lembaga keuangan sangat mendukung dalam upaya pencapaian visi Kabupaten Ciamis.

Upaya pencapaian visi tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan lima misi pembangunan sebagai berikut : *Pertama*, menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam agribisnis dan pariwisata; *Kedua*, mengembangkan jiwa kewirausahaan aparatur pemerintah dan masyarakat; *Ketiga*, mengembangkan jaringan kemitraan agribisnis dan pariwisata; *Keempat*, meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian serta penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan; dan *Kelima*, menyelenggarakan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kelautan secara optimal dan lestari serta menegakkan supremasi hukum.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2009 yang telah tersusun dalam Renstra Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 ditempuh melalui langkah-langkah prioritas pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan dari masing-masing misi di atas. Prioritas pembangunan pada RPJMD kesatu dibagi dalam lima bidang pokok, yaitu:

1. Pembangunan Kependudukan, Agama, dan Sosial Budaya

- Pembangunan kependudukan diprioritaskan pada pengendalian jumlah kelahiran melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Selain itu juga pembangunan kependudukan diprioritaskan pada pemberdayaan rumah tangga khususnya rumah tangga miskin

Untuk mewujudkan data tunggal dan menjamin kepastian hukum setiap penduduk dilaksanakan melalui pengelolaan sistem administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak penduduk, dan perlindungan sosial.

- Pembangunan agama diprioritaskan pada upaya menciptakan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari melalui pembinaan lembaga dan organisasi keagamaan, pembinaan dan pengawasan perkembangan pelaksanaan ibadah sebagai antisipasi tumbuhnya agama atau kepercayaan baru yang menimbulkan keresahan pada masyarakat, serta bantuan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana keagamaan.

Dengan indikator pembangunan adalah terciptanya harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, interumat dan antarumat beragama, antarumat beragama dengan pemerintah, serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama.

- Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan pendidikan dasar sembilan tahun sebagai sasaran utama pembangunan pendidikan melalui rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, perluasan kesempatan mendapatkan pendidikan dasar yang didukung dengan peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, tenaga pengajar, dan kurikulum.

Untuk memperluas kesempatan mendapatkan pendidikan dilaksanakan melalui meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan terutama pendidikan dasar sembilan tahun, perluasan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan formal, nonformal, dan luar biasa yang lebih berkualitas yang mempunyai relevansi dengan *life skill*, serta meningkatkan budaya baca masyarakat.

- Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan jumlah kematian ibu dan bayi serta meningkatnya Angka Harapan Hidup yang dilaksanakan melalui pemerataan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit, peningkatan sistem *surveilans*, serta perbaikan gizi masyarakat.

Upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sumber daya kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan manajemen kesehatan yang didukung oleh pengembangan sistem informasi kesehatan serta penguatan sistem perUndang-Undangan, Penelitian dan pengembangan kesehatan, peningkatan pembiayaan kesehatan dan upaya pencegahan, peningkatan promosi kesehatan, serta terciptanya sistem jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin.

Untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat melalui upaya penggerakkan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek tetapi sebagai subyek dalam pembangunan, terutama dalam berperilaku hidup bersih dan sehat yang ditunjang oleh lingkungan yang sehat yang sasarannya diwujudkan dalam pembinaan Desa Siaga.

Indikator keberhasilan pembangunan bidang ini adalah Angka Kematian Ibu (AKI) 27 orang, Angka Kematian Bayi (AKB) 40,35 0/00 Kelahiran Hidup, dan Angka Harapan Hidup (AHH) 68, 50 Tahun.

- Pembangunan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan pada pemberdayaan rumah tangga terutama pemberdayaan rumah tangga miskin dengan mengoptimalkan pemanfaatan kemampuan potensi yang dimiliki melalui pengembangan bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan dan ketenagakerjaan.

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan daerah diprioritaskan pada peningkatan partisipasi dan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kesejahteraan masyarakat, serta

mendorong tumbuhnya kreativitas prakarsa dan inovasi dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

- Pembangunan kesejahteraan sosial diprioritaskan pada promosi dan pemberdayaan ekonomi penduduk terutama penduduk miskin melalui peningkatan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelompok rentan lainnya, pelayanan rehabilitasi dan jaminan sosial, pelayanan sosial dasar lainnya, serta menjamin ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam dan sosial. Upaya lain yang dilakukan melalui mengembangkan peran perempuan dalam pembangunan serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Dalam mendukung promosi dan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dilakukan melalui upaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, meningkatkan pemberdayaan bagi rumah tangga miskin dan PMKS lainnya, meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak, lansia, penyandang cacat dan yatim piatu.

- Pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada identifikasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal melalui pengembangan budaya daerah yang mendukung kegiatan pariwisata dan agribisnis sebagai landasan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Ciamis, pemanfaatan dan perlindungan terhadap budaya daerah yang berupa modal sosial yang dilaksanakan melalui penguatan kepribadian pemerintah dan masyarakat, pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
- Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan diprioritaskan pada pengembangan lembaga-lembaga kepemudaan dalam pembangunan dan meningkatkan prestasi olah raga daerah melalui pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan atlet daerah, serta pemberdayaan pemuda pada kegiatan ekonomi sebagai pelopor dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Pembangunan ketenagakerjaan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan pencari kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, penyediaan lapangan pekerjaan dan penguatan aksesibilitas terhadap lembaga-lembaga pelatihan dan penyalur tenaga kerja sebagai upaya mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk usia produktif, serta fasilitasi standar kesejahteraan pekerja.

2. Pembangunan Perekonomian Daerah

- Pembangunan perekonomian daerah diprioritaskan pada peningkatan produksi daerah melalui Penataan komoditi unggulan daerah dan peningkatan iklim investasi : promosi investasi dan penyiapan sarana prasarana pendukung investasi untuk mewujudkan peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkualitas, meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, meningkatkan daya beli, serta meningkatnya jumlah investasi.

Indikator capaian LPE 5 %, PDRB perkapita Rp. 7.400.000,-, dan menurunnya penduduk miskin 1 % per tahun, menurunnya tingkat pengangguran, dan meningkatnya daya beli 2 % per tahun.

- Pembangunan pertanian diprioritaskan pada pengembangan agribisnis yang diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi melalui penataan kawasan agribisnis, perbaikan infrastruktur pendukung, pengembangan sumber daya manusia pertanian, pengembangan usaha bidang pertanian unggulan, perbaikan kondisi lingkungan pertanian, pengembangan pemasaran hasil produksi dan penerapan teknologi produksi pertanian (pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan) dan kelautan yang dilaksanakan secara terpadu, serta penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan.

Pembangunan pertanian juga diprioritaskan pada penciptaan ketahanan pangan, pembinaan industri hasil hutan, pengembangan perikanan tangkap dan pengembangan kawasan budi daya laut, air payau dan tawar. Upaya tersebut ditandai penataan dan pengembangan produktivitas komoditi unggulan, mengembangkan surplus beras, meningkatnya pangsa pasar industri pertanian, serta meningkatnya optimalisasi penggunaan lahan pertanian.

- Pembangunan pariwisata diprioritaskan pada pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan kemitraan kepariwisataan melalui penataan obyek wisata unggulan dan penataan sarana dan prasarana akomodasi wisata, pengembangan potensi budaya daerah dan penggalian potensi wilayah lainnya yang didukung dengan sistem informasi dan promosi yang mudah diakses oleh wisatawan.

Indikator pengembangan kepariwisataan ditandai dengan meningkatnya arus kunjungan wisata domestik dan wisatawan mancanegara, lama tinggal wisatawan selama satu hari, serta tumbuhnya akomodasi wisata 10 %.

- Peningkatan keuangan daerah diprioritaskan pada pengelolaan administrasi keuangan yang efektif dan efisien melalui pengendalian dan pengawasan penggunaannya. Peningkatan keuangan daerah dilaksanakan melalui meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diindikasikan semakin meningkat dan menguatnya PAD terhadap total pendapatan daerah 22,01 %, serta mampu mendukung kebutuhan belanja daerah yang proporsional, efisien dan efektif.

3. Pembangunan Industri dan Perdagangan

- Pembangunan industri di Kabupaten Ciamis diprioritaskan pada penataan kluster industri melalui penataan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah terutama yang mengolah hasil pertanian dengan memberikan fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha industri, pengembangan produk unggulan industri, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pengembangan produk.

Indikator pembangunan industri dan perdagangan yaitu meningkatnya investasi industri 11 %, dan meningkatnya industri yang berkualitas yang didukung sertifikasi (HAKI).

- Pembangunan perdagangan diprioritaskan pada revitalisasi dan pengembangan prasarana perdagangan, pembinaan pelaku usaha perdagangan serta penyiapan pasar modern untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah. Sedangkan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi diupayakan pada fasilitasi pembinaan manajemen kelembagaan.
- Pengembangan industri dan perdagangan daerah juga diprioritaskan pada penguatan peningkatan promosi dan kerja sama investasi yang dijalankan secara sinergis antar pelaku usaha lokal dan regional melalui pemanfaatan dan pengaturan pasar regional, optimalisasi kelembagaan dan jaringan kemitraan usaha, penguatan sertifikasi produk daerah, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri menengah dan industri besar.

4. Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang

- Pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur wilayah yang mendukung kegiatan agribisnis dan pariwisata daerah, pelayanan mobilitas penduduk, dan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi, rehabilitasi, dan peningkatan sarana infrastruktur yang telah ada, serta persiapan pembangunan infrastruktur baru.

Pembangunan infrastruktur transportasi dan peningkatan status dan kualitas jalan melalui pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara.

- Pembangunan irigasi dan air bersih diprioritaskan pada pengembangan jaringan irigasi, rawa, jaringan pengairan lainnya dengan cakupan layanan irigasi teknis 30 % luas lahan sawah serta pengendalian pembuangan air limbah dan peningkatan saran dan prasarana penyediaan air bersih.
- Pembangunan ketenagalistrikan diprioritaskan pada pengembangan bidang ketenagalistrikan serta pengembangan sumber energi alternatif. Pembangunan telekomunikasi diprioritaskan pemanfaatan jaringan komunikasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya konservasi, meningkatkan dan mempertahankan fungsi hutan, penyediaan dan pengolahan air baku melalui peningkatan koordinasi antara instansi dan masyarakat pengguna, upaya pembinaan, pengawasan, dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya alam dan lingkungan hidup, peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pengelolaan konservasi (sungai, danau dan SDA lainnya) ditandai dengan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (peningkatan pengendalian polusi lingkungan, pengendalian kebakaran hutan, pencegahan bahaya kebakaran, pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian banjir, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut dan prakiraan iklim laut). Dalam rangka mengembangkan potensi kelautan pemberdayaan masyarakat pesisir diprioritaskan pada pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, pembangunan lingkungan hidup diprioritaskan pada pengembangan manajemen bencana melalui peningkatan mitigasi bencana alam, pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.

- Penataan ruang diprioritaskan pada pengkajian pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan potensi unggulan daerah melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan daerah rawan bencana, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, perencanaan penataan ruang, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang, penegakan peraturan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pembangunan sistem pendaftaran tanah, penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan, pemetaan kawasan rawan bencana, pengembangan perumahan, lingkungan sehat perumahan, pemberdayaan komunitas permukiman, perbaikan perumahan akibat bencana alam dan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

5. Pembangunan Pemerintahan

- Pembangunan politik diprioritaskan pada pengorganisasian kehidupan politik yang berorientasi pada pemberdayaan pendidikan politik bagi masyarakat dengan mengoptimalkan peran strategis masyarakat melalui kegiatan partisipasi politik yang mampu mengantisipasi berbagai perubahan sosial dalam konteks global. Sedangkan pembangunan infrastruktur politik diprioritaskan pada pembinaan demokratisasi dalam partai politik khususnya dalam rekrutmen calon anggota badan perwakilan rakyat, dalam bentuk pembinaan sistem rekrutmen yang sehat dan benar dalam partai, sehingga akan diperoleh wakil terbaik untuk mengemban pekerjaan pada badan perwakilan rakyat. Pembinaan juga dilakukan pada organisasi pers, lembaga

swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai peranan penting bagi pemberdayaan badan perwakilan rakyat maupun pemerintah daerah.

- Pembangunan hukum diprioritaskan pada kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi atas produk hukum daerah terhadap peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi, penegakkan hukum secara adil, peningkatan kesadaran hukum, dan pembinaan hak asasi manusia melalui pendidikan dan penyuluhan bagi aparatur dan masyarakat agar mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum dan HAM, peningkatan pelayanan hukum dan pelayanan publik lainnya, pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat kurang mampu yang menghadapi masalah hukum di pengadilan, peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayaagunaan sumber daya laut. Pembangunan hukum juga diprioritaskan pada upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
- Pembangunan aparatur diprioritaskan pada penciptaan tata kelola pemerintahan yang profesional, peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang diwujudkan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan 30 % berpendidikan S1 .

Dengan indikator capaian berupa meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya kualitas pendidikan sumberdaya aparatur.

4.3.2 RPJMD Kedua (2009 - 2014)

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian hasil pembangunan pada tahap pertama, yang masih mengandalkan pada dua *core bussines* yang diwujudkan pada Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009, yaitu "*Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Terdepan dalam Agribisnis dan Pariwisata di Priangan Tahun 2009*" yang tertuang dalam Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 sebagai bentuk transisi pada RPJPD 2005-2025, maka pada RPJMD kedua ditujukan untuk penguatan pertumbuhan hasil pembangunan yang telah dicapai yang disesuaikan dengan perubahan visi Kabupaten Ciamis menjadi "*Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025*".

Pada RPJMD kedua dilakukan **upaya penguatan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kemampuan penguasaan IPTEKS dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya yang dimiliki. Dalam upaya mewujudkan penguatan perekonomian masyarakat melalui penguatan peningkatan revitalisasi infrastruktur yang ada dan pembangunan infastruktur yang baru, meningkatkan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat serta menjaga kualitas lingkungan**, maka ditetapkan prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbagi dalam 5 (lima) bidang pokok, yaitu :

1. Pembangunan Kependudukan, Agama, dan Sosial Budaya
 - Pembangunan kependudukan diprioritaskan pada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk alamiah melalui peningkatan jumlah akseptor KB mantap, penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) mencapai 2,10, pendewasaan usia perkawinan pertama minimal pada usia 18,5 tahun, meningkatkan pencapaian KB aktif Pasangan Usia Subur (PUS) dan KB Mandiri, promosi dan pembinaan kesehatan reproduksi remaja.
 - Untuk mengendalikan laju migrasi dan pemerataan penduduk dilakukan pembangunan melauai perluasan lapangan pekerjaan khususnya di bidang pertanian dan industri kecil nonformal dan pemerataan pembangunan wilayah.
 - Meningkatkan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan yang lebih efektif untuk meningkatkan akurasi data kependudukan.

- Pembangunan bidang agama diprioritaskan pada peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari melalui peningkatan peran lembaga dan organisasi keagamaan, pembinaan dan pengawasan perkembangan pelaksanaan ibadah sebagai antisipasi tumbuhnya agama atau kepercayaan baru yang menimbulkan keresahan pada masyarakat, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana keagamaan. Dengan indikator pembangunan terwujudnya kesadaran pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, interumat dan antarumat beragama beragama, antarumat beragama dengan pemerintah serta mengantisipasi munculnya pemahaman ajaran agama yang menyimpang
- Pembangunan bidang pendidikan diprioritaskan pada pemantapan program pendidikan dasar sembilan tahun sebagai rintisan pendidikan dasar 12 tahun melalui perluasan pelayanan pendidikan dan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan formal, nonformal dan luar biasa yang berkualitas, perluasan pemerataan mutu dan relevansi pendidikan terhadap pengembangan kecakapan hidup (*life skill*), meningkatkan peranserta masyarakat bidang pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan kecakapan hidup (*life skill*), peningkatan manajemen pelayanan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi daerah, dan pengembangan kemitraan dengan pendidikan tinggi di daerah dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Indikator keberhasilan ini adalah pencapaian RLS sebesar 7,0 dan pencapaian AMH sebesar 98%.

- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat diprioritaskan pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam baca, tulis, hitung, penguasaan teknologi, serta kemampuan inovasi yang berbasis pada pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah melalui pemantapan peranan sumber daya manusia, pengembangan budaya dan minat baca, pengembangan perpustakaan dan pemanfaatan IPTEKS dalam pengembangan potensi daerah.
- Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada upaya pemantapan pencapaian derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan spesifikasi pelayanan kesehatan di 51 Puskesmas dan 1 (satu) RSUD yang ditunjang oleh ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang mempunyai daya saing global, penguatan manajemen kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan sistem pembiayaan kesehatan terutama jaminan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya jaminan kesehatan rumah tangga miskin, serta strategi pembangunan kesehatan disesuaikan dengan permasalahan yang ada dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan guna meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan dan menciptakan seluruh desa menjadi desa siaga.

Indikator keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah pencapaian AKI 22 orang, AKB 35,30 0/00, dan AHH 68,80 Tahun.

- Pembangunan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan pada menurunkan jumlah rumah tangga miskin melalui pemberdayaan rumah tangga miskin, pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya perempuan dan pemuda yang didukung dengan pemberdayaan kelembagaan tingkat desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, pengembangan bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan dan ketenagakerjaan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan organisasi perempuan dan pemuda di tingkat kecamatan dan desa.

Indikator keberhasilan bidang ini adalah penurunan jumlah keluarga prasejahtera 2,05 % per tahun, peningkatan keluarga sejahtera II dan III masing-masing 1 % per tahun, dan pengembangan kader pemberdayaan masyarakat yang terlatih.

- Pembangunan Kesejahteraan Sosial diprioritaskan pada pengembangan pembudayaan, dan penguatan akses bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelompok rentan lainnya melalui pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberian bantuan jaminan dan pelayanan sosial dasar lainnya yang ditandai: peningkatan kualitas hidup, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.
- Pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada peningkatan dan pengembangan nilai-nilai kepribadian dan budaya yang berkembang di masyarakat, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya, serta peningkatan kerjasama pembinaan dan pengelolaan kekayaan budaya menjadi suatu kekhasan daerah yang menunjukkan jatidiri dan identitas daerah.
- Pembangunan pemuda dan olahraga diprioritaskan pada pengembangan lembaga-lembaga kepemudaan yang berperan dalam pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga daerah melalui pembinaan organisasi kepemudaan, atlet daerah, pemberdayaan pemuda sebagai pelopor dalam bidang ekonomi dan pendidikan.
- Pembangunan ketenagakerjaan diprioritaskan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan pencari kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan dan perkembangan IPTEKS melalui penyediaan lapangan pekerjaan diberbagai sektor kegiatan ekonomi penduduk dan pengembangan aksesibilitas terhadap lembaga-lembaga pelatihan dan penyalur tenaga kerja, serta fasilitasi standar kesejahteraan pekerja.

2. Pembangunan Perekonomian Daerah

- Pembangunan perekonomian daerah diprioritaskan untuk meningkatkan pengembangan produksi daerah melalui Pengembangan komoditi unggulan daerah dan penguatan penataan komoditi unggulan, Pengembangan investasi dan kelompok usaha: promosi investasi dan pengembangan sarana prasarana pendukung investasi, dan pengembangan kelompok ekonomi produktif dan koperasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkualitas, meningkatnya PDRB perkapita, meningkatkan daya beli dan meningkatnya jumlah investasi.

Indikator pencapaian bidang ini adalah LPE 6.5 %, PDRB perkapita Rp. 9.700.000,-

- Pembangunan pertanian diprioritaskan pada penguatan penataan agribisnis yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, pasca panen dan pemasaran hasil pertanian melalui penguatan Infrastruktur pendukung, penguatan pengembangan sumber daya manusia agribisnis, penguatan pengembangan usaha bidang pertanian yang didukung oleh pelestarian lingkungan pertanian, pemasaran hasil produksi dan penerapan teknologi produksi pertanian (pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan) dan kelautan yang dilaksanakan secara terpadu, peningkatan ketahanan pangan, pembinaan industri hasil pertanian (pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan), serta pengembangan perikanan tangkap dan budi daya perikanan.

Upaya tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah komoditi unggulan, meningkatnya produksi komoditi unggulan rata-rata 20 %, meningkatnya surplus beras 26 %, meningkatnya pangsa pasar lokal, serta meningkatnya optimalisasi intensifikasi pertanian.

- Pembangunan pariwisata diprioritaskan pada manajemen pariwisata yang profesional untuk memantapkan pengembangan potensi ekowisata, agrowisata, wisata budaya dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut, gunung, dan hutan, pengembangan sarana dan prasarana akomodasi kepariwisataan dalam rangka lanjutan *recovery* pasca bencana tsunami, serta peningkatan upaya-upaya pelestarian dan penggalan objek wisata lainnya melalui penataan obyek wisata

unggulan, peningkatan infrastruktur, pengembangan obyek wisata baru, serta promosi wisata.

Indikator pengembangan kepariwisataan ditandai dengan meningkatnya arus kunjungan wisata domestik dan wisatawan mancanegara, lama tinggal wisatawan selama 2 (dua) hari serta tumbuhnya akomodasi wisata 10 %, meningkatnya objek dan atraksi wisata unggulan.

- Pengelolaan keuangan daerah diprioritaskan pada peningkatan pengembangan keuangan daerah melalui penguatan peningkatan PAD dan proporsinya semakin besar terhadap volume APBD. Belanja daerah proporsinya semakin besar untuk kepentingan belanja pembangunan dibanding belanja aparatur.

Dengan indikator belanja pembangunan naik lebih besar daripada belanja aparatur. Proporsi terhadap total pendapatan 39,42 %.

3. Pembangunan Industri dan Perdagangan

- Pembangunan industri di Kabupaten Ciamis diprioritaskan pada pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah terutama yang mengolah hasil pertanian dan kehutanan menjadi produk unggulan daerah melalui peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha industri dalam mengembangkan *interpreneurship*, penguatan produk unggulan industri yang berkualitas yang memenuhi sertifikasi dan penguatan kelembagaan.

Indikator pembangunan industri dan perdagangan yaitu meningkatnya investasi industri 18%, dan meningkatnya industri yang berkualitas yang didukung sertifikasi (HAKI).

- Pembangunan perdagangan diprioritaskan pada revitalisasi dan pengembangan prasarana perdagangan, pembinaan pelaku usaha perdagangan serta pengembangan pasar modern untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah. Sedangkan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi diupayakan pada fasilitasi pembinaan manajemen kelembagaan.

Indikator pembangunan perdagangan ditandai dengan berkembang pelaku usaha perdagangan 45 %, meningkatnya distribusi barang dan jasa khususnya kebutuhan pokok masyarakat.

- Dalam rangka mendukung pengembangan industri dan perdagangan dilaksanakan melalui peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan antar daerah dan wilayah, peningkatan promosi investasi serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia pelaku industri kecil.

4. Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

- Pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada pengembangan penyediaan infrastruktur wilayah yang menunjang pengembangan kawasan agribisnis, usaha dan industri pariwisata, mobilitas penduduk, dan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi, rehabilitasi, dan peningkatan sarana infrastruktur yang telah ada serta pembangunan infrastruktur baru.

Peningkatan infrastruktur transportasi wilayah yang diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis dan pariwisata, melalui peningkatan kualitas/status 30 % jalan, berkembangannya jaringan transportasi masal 20 %, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara.

- Pembangunan irigasi dan air bersih diprioritaskan pada penguatan pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian pembuangan air limbah dan sanitasi lingkungan dengan cakupan layanan irigasi teknis 45 % luas lahan sawah.

Pembangunan air bersih diarahkan pada perluasan aksesibilitas terhadap penyediaan air bersih serta rintisan penyediaan sarana/prasarana air minum.

- Pembangunan ketenagalistrikan dan telekomunikasi diprioritaskan pada pemerataan cakupan layanan ketenagalistrikan yang ditandai: keterjangkauan jaringan listrik di 36 kecamatan, pembangunan jaringan listrik 250 km (27,3 %), serta pengembangan energi terbarukan; dan pemerataan cakupan layanan telekomunikasi yang ditandai : pengembangan pemanfaatan fasilitas komunikasi untuk kepentingan publik di perdesaan dan wilayah pesisir serta pemanfaatan telekomunikasi dan informasi untuk pengembangan *e-government* .
- Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup tetap diarahkan agar pemanfaatan sumberdaya alam memperhatikan aspek-aspek kelestariannya dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian, baik yang dilakukan perorangan, kelompok, badan hukum dengan menerapkan sistem insentif dan disinsentif yang efektif. Pelaku-pelaku usaha galian/tambang ilegal 50 % dapat terbina dengan jaminan melakukan upaya pengelolaan lingkungan secara baik. Hutan negara dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari yang ditunjukkan dengan perolehan sertifikat pengelolaan hutan lestari, lahan pertanian dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung dan kaidah konservasi tanah dan air, rehabilitasi lahan kritis dapat diselesaikan. Gerakan penanaman pohon dalam rangka penghijauan lingkungan ditingkatkan untuk menambah penutupan lahan bervegetasi tetap minimal 30 % dari luas wilayah. Selanjutnya pemasyarakatan sumur resapan air hujan dalam rangka konservasi air digalakan dengan capaian target minimal 20 % dari kebutuhan sumur resapan air hujan dapat terpenuhi. Pada daerah-daerah tertentu dilakukan pembuatan *Check Dam*, Embung, Dam Penahan untuk pengendalian lumpur dan konservasi air. Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada sungai yang telah mengalami tingkat pencemaran tinggi dan digunakan sebagai bahan baku air minum melalui program kali bersih yang melintasi kota Ciamis. Selain itu, untuk industri yang menghasilkan limbah cair 20 % harus dilengkapi dengan IPAL, sistem pelayanan persampahan ditingkatkan dengan cakupan pelayanan di 11 kecamatan, memasyarakatkan pembuatan SPAL bagi rumah tangga dengan cakupan minimal 40 %.
- Penataan ruang diprioritaskan pada pengembangan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, sehat, dan memerhatikan pada kepentingan publik, perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, perencanaan penataan ruang, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang, penegakan peraturan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pemetaan kawasan rawan bencana, pengembangan perumahan, lingkungan sehat perumahan, perbaikan perumahan akibat bencana alam, serta peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana.

5. Pembangunan Pemerintahan

- Pembangunan politik dan demokratis diprioritaskan pada pemantapan pengorganisasian kehidupan politik yang berorientasi pada pemberdayaan pendidikan politik serta peningkatan intensitas komunikasi dan budaya politik yang berkembang di masyarakat dengan mengedepankan pada etika politik yang ditandai saling menghargai/menghormati perbedaan pendapat dalam konteks kemajemukan masyarakat.
- Pembangunan hukum diprioritaskan pada penguatan penyelarasan dan pelaksanaan produk hukum yang bersifat pengaturan, penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat dan perlindungan HAM dan peningkatan pelayanan hukum dan pelayanan publik lainnya melalui sosialisasi bidang hukum, peningkatan pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat kurang mampu, serta penegakan hukum

dalam pendayagunaan sumber daya alam serta pemeliharaan ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

- Pembangunan aparatur diprioritaskan pada pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur melalui rekrutmen yang disesuaikan dengan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), peningkatan efektivitas pengawasan aparatur daerah serta koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat, pembinaan dan peningkatan kesejahteraan aparatur, peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab.

Dengan indikator meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan sumberdaya aparatur 40 % S1.

- Pembangunan pemerintahan desa/kelurahan diprioritaskan pada pemberdayaan aparatur desa/kelurahan, pengembangan otonomi desa dalam mengembangkan swadaya masyarakat melalui pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, pemberian bantuan keuangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara proporsional dan kompetitif, identifikasi desa/kelurahan berdasarkan potensi yang dimiliki, identifikasi desa pertumbuhan, desa transisi, dan desa tertinggal.

4.3.3. RPJMD Ketiga (2014 - 2019)

Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD kesatu dan kedua, RPJMD ketiga ditujukan untuk memantapkan pengembangan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya dalam rangka pencapaian daya saing untuk mewujudkan kemandirian masyarakat yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi wilayah yang berkualitas dengan pemantapan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Prioritas pembangunan pada tahap ini sebagian besar merupakan kelanjutan hasil-hasil pembangunan pada tahap sebelumnya yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbagi dalam 5 (lima) bidang pokok, yaitu :

1. Pembangunan Kependudukan, Agama, dan Sosial Budaya

- Pembangunan kependudukan diprioritaskan pada penguatan upaya pengendalian jumlah kelahiran melalui penurunan Total Fertility Rate (TFR) mencapai 2.08, pendewasaan usia perkawinan pertama pada usia 19 tahun, memantapkan peningkatan pencapaian KB aktif Pasangan Usia Subur (PUS) dan KB Mandiri yang didukung dengan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pengendalian migrasi penduduk, dan pemerataan persebaran penduduk dilaksanakan melalui Pengembangan usaha keluarga diberbagai sector kegiatan ekonomi masyarakat dan tetap mengembangkan pembangunan wilayah.

Meningkatkan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan yang lebih efektif, menyeluruh, terintegrasi, dan akurat berbasis *Hight Technology*.

Pembangunan keagamaan diprioritaskan pada pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama melalui pengembangan dan pemantapan peran lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dalam mengembangkan pemantapan pengawasan pelaksanaan ibadah sebagai antisipasi tumbuhnya agama atau kepercayaan baru yang menimbulkan keresahan pada masyarakat, penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasaran keagamaan.

- Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada penuntasan program pendidikan dasar sembilan tahun dan penguatan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun melalui optimalisasi pelayanan pendidikan, pemantapan dan peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan formal, non formal dan luar biasa yang lebih berkualitas, peningkatan manajemen pelayanan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan peranserta masyarakat di bidang pendidikan, serta penguatan keberadaan lembaga pendidikan tinggi.
- Peningkatan pemerataan mutu, relevansi pendidikan, dan peningkatan pendidikan *life skill* dilaksanakan melalui pengembangan dan penguatan pendidikan kejuruan yang disesuaikan dengan potensi daerah dan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga pengajar dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi daerah, pengembangan kemitraan dengan pendidikan tinggi di daerah dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan menguatkan pengembangan budaya dan minat baca masyarakat, serta pengembangan akses masyarakat terhadap perpustakaan.

Indikator keberhasilan ini adalah pencapaian RLS sebesar 7,50 dan pencapaian AMH sebesar 99%.

- Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada penguatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan situasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan dan Penguatan sistem pembiayaan kesehatan khususnya jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan pembangunan kesehatan diprioritaskan pada upaya penguatan pengembangan seluruh desa menjadi desa sehat siaga, serta penguatan pengembangan strategi program bidang kesehatan yang sesuai dengan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit serta perubahan ekologi dan lingkungan.

Indikator keberhasilan adalah pencapaian AKI 17 orang, AKB 30,25 0/00, dan AHH 70,05 Tahun.

- Pembangunan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan pada menurunkan jumlah rumah tangga miskin melalui penguatan dan pengembangan ekonomi masyarakat, pemberdayaan kelembagaan tingkat desa, penguatan kualitas sumberdaya perempuan dan pemuda, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sendiri, mengembangkan kreatifitas prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Selain itu juga pemberdayaan masyarakat diarahkan pada upaya mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan dan sumberdaya alam.

Indikator keberhasilannya adalah penurunan keluarga prasejahtera 2,05 % per tahun, peningkatan keluarga sejahtera II dan III masing-masing 1 % per tahun, dan pengembangan kader pemberdayaan masyarakat yang terlatih sebanyak 10 orang per desa.

- Pembangunan kesejahteraan sosial diprioritaskan pada penguatan pembudayaan aksesibilitas bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelompok rentan lainnya melalui : penguatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberian bantuan jaminan dan pelayanan sosial dasar lainnya yang ditandai : peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender anak.

Penguatan peran perempuan dalam pembangunan melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan

ekonomi keluarga. Sedangkan upaya perlindungan dan kesejahteraan anak dilaksanakan melalui kemudahan akses terhadap kebutuhan dasar yang layak.

- Pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada pengembangan dan penguatan nilai-nilai budaya dan sistem sosial yang berkembang di masyarakat sebagai modal pembangunan daerah melalui pemanfaatan dan perlindungan budaya daerah berupa modal sosial untuk menguatkan kepribadian masyarakat, pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya, Peningkatan kreatifitas budaya, dan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
- Pembangunan pemuda diprioritaskan pada pengembangan lembaga-lembaga kepemudaan dalam pembangunan dan meningkatkan prestasi olah raga daerah melalui pembinaan organisasi kepemudaan, atlet daerah yang profesional, pemberdayaan pemuda sebagai pelopor dalam bidang ekonomi dan pendidikan.
- Pembangunan ketenagakerjaan diprioritaskan pada penguatan pengembangan kemampuan dan keterampilan pencari kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan dan perkembangan IPTEK melalui pengembangan penyediaan lapangan pekerjaan diberbagai sektor kegiatan ekonomi penduduk, pengembangan aksesibilitas terhadap lembaga-lembaga pelatihan dan penyalur tenaga kerja, fasilitas standar kesejahteraan pekerja, dalam regional dalam memperluas jaringan lowongan pekerjaan.

2. Pembangunan Perekonomian Daerah

- Pembangunan perekonomian daerah diprioritaskan pada penguatan dan merintis pemantapan peningkatan produksi daerah melalui pemantapan komoditi unggulan daerah yang mempunyai daya saing regional dan nasional, penguatan iklim berusaha dan investasi : penguatan promosi, kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung investasi, serta penguatan daya saing kelompok ekonomi produktif dan koperasi yang ditandai dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) berkualitas, tinggi dan meratanya PDRB perkapita, semakin menguatnya kemampuan daya beli masyarakat, dan meningkatnya jumlah investasi.

Indikator capaian adalah LPE 7 %, PDRB perkapita Rp. 11.700.000,-

- Pembangunan pertanian diprioritaskan pada pemantapan penataan agribisnis yang diarahkan pada peningkatan kualitas produksi pertanian, pasca panen dan pemasaran hasil melalui peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, penguatan kemampuan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia agribisnis, pengembangan usaha bidang pertanian yang berwawasan lingkungan, pengembangan pemasaran hasil produksi dan penerapan teknologi produksi pertanian, dan mekanisasi pertanian (pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan kehutanan) dan kelautan yang dilaksanakan secara terpadu, serta penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan.

Pembangunan pertanian juga diprioritaskan pada pemantapan ketahanan pangan, pembinaan industri hasil pertanian (pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan) dan kelautan melalui pengembangan perikanan tangkap dan pengembangan kawasan budi daya laut, air payau dan tawar.

Upaya tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah komoditi unggulan rata-rata 24 %, meningkatnya produksi komoditi unggulan 24 %, meningkatnya surplus beras 32 %, meningkatnya pangsa pasar regional, serta meningkatnya optimalisasi penggunaan lahan pertanian.

- Pembangunan kelautan diprioritaskan pada penguatan optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan melalui penguatan pengembangan sarana dan prasarana kelautan, penggunaan teknologi terapan dalam meningkatkan penanganan pasca panen, memperluas jaringan pemasaran hasil tangkapan, serta pelestarian sumberdaya kelautan melalui pengembangan partisipasi masyarakat.

- Pembangunan pariwisata diprioritaskan pada penguatan pengembangan manajemen pariwisata dalam upaya memantapkan eksplorasi dan pengembangan ekowisata, agrowisata, wisata budaya dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut, gunung, dan hutan melalui peningkatan penataan obyek wisata unggulan, pemantapan infrastruktur pendukung, pemantapan manajemen kepariwisataan yang terintegrasi.

Indikator pengembangan kepariwisataan ditandai dengan meningkatnya arus kunjungan wisata domestik dan wisatawan mancanegara, lama tinggal wisatawan selama serta tumbuhnya akomodasi wisata 20 %, meningkatnya obyek dan atraksi wisata unggulan minimal 3 (tiga) objek wisata.

- Pengelolaan keuangan daerah diprioritaskan pada penguatan peningkatan keuangan daerah melalui peningkatan PAD yang proporsinya semakin besar terhadap volume pendapatan, peningkatan daya guna kekayaan, aset dan meningkatkan peran perusahaan daerah, serta mengintensifkan peluang-peluang sumber pendapatan daerah.

Capaian indikatornya adalah meningkatnya kontribusi pendapatan dari pemanfaatan kekayaan dan aset daerah 20 % dan kontribusi pendapatan perusahaan daerah terhadap PAD 20 %.

3. Pembangunan Industri dan Perdagangan

- Pembangunan industri di Kabupaten Ciamis diprioritaskan pada penguatan peningkatan industri rumah tangga dan industri kecil dan menengah terutama yang mengolah hasil pertanian dan kehutanan melalui penguatan fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha industri, penguatan produk unggulan industri yang berkualitas yang memenuhi sertifikasi dan pemantapan kelembagaan, serta mengembangkan jaringan kerjasama (*networking*) antara pengusaha dengan berbagai tingkatan.

Indikator pembangunan industri dan perdagangan yaitu meningkatnya investasi industri 18 %, dan meningkatnya industri yang berkualitas yang didukung sertifikasi (HAKI).

- Pembangunan perdagangan diprioritaskan pada penguatan peningkatan pelaku usaha perdagangan serta mendukung penguatan produk unggulan daerah. Sedangkan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi diupayakan pada pemantapan manajemen kelembagaan usaha.

Indikator pembangunan perdagangan ditandai dengan berkembang pelaku usaha perdagangan 45%, meningkatnya distribusi barang dan jasa khususnya kebutuhan pokok masyarakat.

- Pengembangan industri dan perdagangan daerah juga diprioritaskan pada penguatan peningkatan promosi dan kerja sama investasi yang dijalankan secara sinergis antar pelaku usaha lokal dan regional melalui pemanfaatan dan pengaturan pasar regional, optimalisasi kelembagaan dan jaringan kemitraan usaha, penguatan sertifikasi produk daerah, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri menengah dan industri besar.

4. Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang

- Pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada penguatan penyediaan infrastruktur wilayah yang dapat menghubungkan simpul-simpul kegiatan ekonomi produksi dengan tingkat aksesibilitas yang cepat, aman, dan menarik investasi, dan tetap memertahankan pelayanan mobilitas penduduk, kesejahteraan masyarakat melalui penguatan revitalisasi, rehabilitasi, penguatan peningkatan sarana infrastruktur yang telah ada, serta pembangunan infrastruktur baru yang disesuaikan dengan dinamika kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur transportasi diprioritaskan pada penguatan jaringan transportasi yang menunjang peningkatan akses terhadap simpul-simpul kegiatan ekonomi produksi dan pengembangan wilayah melalui peningkatan kualitas status jalan 45%, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur transportasi darat, dan rehabilitasi dermaga penyebrangan.

- Pembangunan irigasi diprioritaskan pada penguatan penyediaan air baku bagi kegiatan pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya melalui pemantapan pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, serta pemantapan pengendalian dan normalisasi sungai yang ditandai dengan cakupan layanan irigasi teknis 65 % luas lahan sawah.

Pembangunan air bersih diprioritaskan pada penguatan penyediaan air minum dalam rangka memperluas cakupan layanan bagi masyarakat melalui penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum, optimalisasi air baku, serta pengendalian limbah dan sanitasi lingkungan.

- Pembangunan ketenagalistrikan dan telekomunikasi diprioritaskan penguatan upaya perluasan dan pemerataan layanan ketenagalistrikan yang ditandai dengan keterjangkauan jaringan listrik 6 (enam) Kecamatan (17 %), pembangunan jaringan listrik 250 km (27,3 %), serta pengembangan energi alternatif terbarukan. Sedangkan penguatan upaya perluasan dan pemerataan layanan telekomunikasi ditandai penguatan fasilitas komunikasi untuk kepentingan publik di perdesaan dan wilayah pesisir, serta meningkatkan pemanfaatan *e-government*.
- Pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelestariannya serta pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan lebih intensif sehingga tidak merusak tatanan ekosistem, hutan negara tetap terjaga kelestariannya, lahan pertanian diusahakan sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, lahan kritis menjadi lahan produktif yang dikelola secara intensif. Usaha-usaha galian/tambang berjalan dengan memperhatikan kaidah konservasi mencapai minimal 60 % dari jumlah pelaku usaha. Hutan negara tetap terjaga kelestariannya, lahan pertanian dimanfaatkan sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. Gerakan penanaman pohon dalam rangka penghijauan areal bekas tebangan dan penghijauan lingkungan tetap dilaksanakan untuk menambah penutupan lahan bervegetasi tetap minimal 31 % dari luas wilayah. Selanjutnya masyarakat sumur resapan air hujan dalam rangka konservasi air ditingkatkan dengan capaian target minimal menjadi 40 % dari kebutuhan sumur resapan air hujan dapat terpenuhi. Pada daerah-daerah tertentu yang memenuhi syarat, pembuatan Check Dam, Embung, Dam Penahan untuk pengendalian lumpur dan konservasi air ditingkatkan. Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan untuk melanjutkan program kali bersih di wilayah kota Ciamis untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat. Selain dari pada itu dilaksanakan melalui pengendalian pencemaran untuk industri yang menghasilkan limbah cair dengan cakupan minimal 30 % usaha industri dilengkapi dengan IPAL, sistem pelayanan persampahan ditingkatkan kualitasnya, pembuatan SPAL bagi rumah tangga ditingkatkan mencapai minimal 45 % dari kebutuhan. Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ditandai perintisan pengembangan sumberdaya alternatif dan perintisan pengembangan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
- Penataan ruang diprioritaskan pada penguatan pengembangan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau melalui perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, perencanaan penataan ruang, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang, penegakan peraturan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pemetaan kawasan rawan

bencana, pengembangan perumahan, lingkungan sehat perumahan, perbaikan perumahan akibat bencana alam dan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana.

5. Pembangunan Pemerintahan

- Pembangunan politik dan demokrasi diprioritaskan pada pemantapan kehidupan politik yang berorientasi pada pemberdayaan pendidikan politik, penguatan proses politik yang lebih demokratis dan terbuka dalam rangka mewujudkan pola hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat.
- Pembangunan hukum diprioritaskan pada penyelarasan dan pelaksanaan produk hukum yang bersifat pengaturan, peningkatan SDM dibidang hukum, penguatan penegakan hukum, kualitas produk hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta pelayanan hukum dan pelayanan publik lainnya dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman melalui melanjutkan sosialisasi hukum, peningkatan kesadaran hukum agar masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum.

Dalam menyelenggarakan pelayanan hukum dan pelayanan publik yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap warga dilaksanakan melalui pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat kurang mampu, peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya alam, serta penguatan produk hukum yang mencerminkan kedaulatan rakyat untuk penyelenggaraan otonomi daerah.

- Pembangunan aparatur diprioritaskan pada penguatan kualitas, kuantitas, dan kompetensi sumber daya aparatur melalui rekrutmen dan penetapan pegawai yang disesuaikan dengan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemantapan efektifitas pengawasan aparatur daerah serta koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat, pemantapan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja, pemantapan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab, serta pemantapan sikap mental demokrasi.

Dengan indikator meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan sumberdaya aparatur 55 % S1.

- Pembangunan Pemerintahan desa/kelurahan diprioritaskan pada pengembangan pemberdayaan pemerintahan desa/kelurahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, peningkatan kompetisi potensi desa/kelurahan, penanganan infrastruktur perdesaan berbasis potensi desa.

4.3.4. RPJMD Keempat (2019 - 2024)

Berlandaskan pelaksanaan pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD kesatu, kedua dan ketiga, RPJMD keempat ditujukan untuk mewujudkan kondisi Kabupaten Ciamis yang mandiri, maju dan sejahtera melalui pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sebagai modal untuk melakukan akselerasi pembangunan dengan menekankan pada terbangunnya struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang kokoh berlandaskan kemandirian dan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia dan berdaya saing.

Prioritas pembangunan pada tahap ini sebagian besar merupakan kelanjutan pembangunan pada tahap sebelumnya yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain itu, terdapat pula prioritas pembangunan yang baru dilakukan pada tahap ini.

1. Pembangunan Kependudukan, Agama dan Sosial Budaya

- Pembangunan kependudukan diprioritaskan pada memantapkan keseimbangan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian pertumbuhan penduduk alamiah dan

migrasi kependudukan yang didukung dengan pemantapan penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) mencapai 2.04, pendewasaan usia perkawinan pertama pada usia 20 tahun, pemantapan pencapaian KB aktif Pasangan Usia Subur (PUS) dan KB Mandiri, serta pemantapan kesejahteraan keluarga dan pengembangan wilayah yang sinergis dengan dinamika ekonomi dan sosial masyarakat.

Pemanfaatan sistem administrasi kependudukan sebagai basis dalam pelayanan publik dan penanganan masalah social- ekonomi masyarakat.

- Pembangunan keagamaan diprioritaskan peningkatan pemantapan peran lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dalam menciptakan harmonisasi antar kelompok masyarakat dan pengembangan toleransi terhadap keragaman agama dan budaya.
- Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada pemantapan pendidikan dasar 12 tahun dan pendidikan kejuruan yang disesuaikan dengan potensi daerah dan pasar tenaga kerja melalui optimalisasi pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas manajemen pelayanan sarana/prasarana pendidikan, tenaga pengajar serta kurikulum, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan pada penguatan peranan sumber daya manusia dalam pemanfaatan potensi daerah, serta peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi di daerah.

Indikator keberhasilan ini adalah pencapaian RLS sebesar 8,25 dan pencapaian AMH sebesar 99,90%.

- Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada pemantapan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan situasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan yang didukung oleh pemantapan pengembangan strategi program bidang kesehatan yang sesuai dengan dinamika kependudukan, perubahan epidemiologi penyakit serta perkembangan ekologi dan lingkungan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat.

Indikator keberhasilan adalah AKI 12 orang, AKB 25,20 0/00, dan AHH 70,30 Tahun

- Pemberdayaan masyarakat diprioritaskan pada menurunkan jumlah rumah tangga miskin melalui pemantapan kawasan-kawasan pertumbuhan dengan memanfaatkan kualitas sumberdaya perempuan dan pemuda, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mampu mencukupi kebutuhan diri dan lingkungannya, penguatan kreatifitas prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pemantapan pemanfaatan kesadaran pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam dalam mengakomodir pembangunan berkelanjutan..

Indikator keberhasilan: terwujud keluarga sejahtera I, peningkatan keluarga sejahtera II dan III masing-masing 1 % per tahun, pengembangan kader pemberdayaan masyarakat yang terlatih sebanyak 15 orang per desa.

- Pembangunan kesejahteraan sosial diprioritaskan pada pembudayaan dan pemantapan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelompok rentan lainnya melalui pemantapan akses dalam memperoleh bantuan jaminan dan pelayanan sosial dasar lainnya dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin yang ditandai : pemantapan pelayanan rehabilitasi sosial pemantapan peningkatan kualitas hidup, pemantapan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan, pemantapan kesejahteraan dan perlindungan anak, serta pemantapan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, sehingga mendukung terwujudnya masyarakat yang maju dan mandiri.
- Pembangunan kebudayaan diprioritaskan melalui pemantapan budaya dan sistem sosial dalam pembangunan daerah, menantapkan pemanfaatan dan perlindungan budaya daerah yang berupa modal sosial untuk menguatkan kepribadian

pemerintah dan masyarakat, pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya dan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

- Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan diprioritaskan pada pengembangan lembaga-lembaga kepemudaan dalam pembangunan dan penguatan prestasi olah raga daerah melalui pembinaan organisasi kepemudaan, atlet daerah yang profesional, pemberdayaan pemuda sebagai pelopor dalam bidang ekonomi dan pendidikan.
- Pembangunan ketenagakerjaan diprioritaskan pada melanjutkan pemantapan dan penguatan kemampuan dan keterampilan pencari kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan diberbagai sektor kegiatan ekonomi penduduk dan perkembangan IPTEKS melalui pemantapan penyediaan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan potensi lokal dan perkembangan IPTEKS yang didukung dengan pemantapan aksesibilitas terhadap lembaga-lembaga pelatihan dan penyalur tenaga kerja, fasilitasi standar kesejahteraan pekerja, serta mengembangkan kerjasama dalam lingkup nasional dalam memperluas jaringan lowongan pekerjaan.

2. Pembangunan Perekonomian Daerah

- Pembangunan perekonomian daerah diprioritaskan pada pemantapan peningkatan produktivitas daerah melalui pemantapan daya saing daerah : pengembangan keanekaragaman komoditi unggulan daerah serta komoditi yang berkualitas ekspor, penguatan iklim berusaha dan investasi, pemantapan usaha promosi dan pemantapan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung, serta pemantapan daya saing kelompok ekonomi produktif dan koperasi yang ditandai dengan mempertahankan tingginya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) berkualitas, tinggi dan meratanya PDRB perkapita, semakin menguatnya kemampuan daya beli dan investasi masyarakat, serta meningkatnya jumlah investasi.

Indikator capaian adalah LPE 7.5 %, PDRB perkapita Rp. 13.500.000,-

- Pembangunan pertanian diprioritaskan pada melanjutkan pemantapan agribisnis yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, pasca panen dan pemasaran hasil pertanian melalui pemantapan peningkatan infrastruktur pendukung, penguasaan pasar yang luas, optimalisasi mekanisasi dan diversifikasi pertanian, optimalisasi mutu produksi pertanian (yang meliputi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan produk pertanian) untuk merespon permintaan konsumen, penguatan pengembangan rekayasa teknologi dan mekanisasi pertanian yang dilaksanakan dengan cara terpadu dan terintegritas dari mulai tanam sampai dengan pasca panen, pemantapan swasembada beras, peningkatan industri hasil pertanian (pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan), serta penguatan pemantapan industri perikanan tangkap dan budidaya perikanan.

Upaya tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah komoditi unggulan 28 %, meningkatnya produksi komoditi unggulan 28 %, meningkatnya surplus beras 40 %, mempertahankan pansa pasar regional dan meningkatnya pangsa pasar nasional %, serta meningkatnya optimalisasi penggunaan lahan pertanian.

- Pembangunan kelautan diprioritaskan pada pemantapan optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan melalui memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kelautan, peningkatan penggunaan teknologi dan rekayasa teknologi dalam pengembangan penanganan pasca panen, memperluas jaringan pemasaran hasil tangkapan, serta pelestarian sumberdaya kelautan melalui pengembangan partisipasi masyarakat.
- Pembangunan pariwisata diprioritaskan pada memantapkan pengembangan manajemen pariwisata dalam pengembangan persaingan ekowisata, agrowisata, wisata budaya dan jasa lingkungan, serta menggali sumberdaya wisata lain yang

berdaya jual, diminati untuk dikunjungi dengan memperhatikan konservasi wilayah laut, gunung, dan hutan yang ramah lingkungan dan ramah budaya.

Indikator pengembangan kepariwisataan ditandai dengan meningkatnya arus kunjungan wisata domestik dan wisatawan mancanegara, lama tinggal wisatawan selama 3 serta tumbuhnya akomodasi wisata 20 %, meningkatnya obyek dan atraksi wisata unggulan minimal 3 objek wisata.

- Pengelolaan keuangan daerah diprioritaskan pada penguatan dan pemantapan keuangan daerah melalui penguatan peningkatan daya guna kekayaan, aset dan perusahaan daerah, serta mengintensifkan peluang-peluang sumber pendapatan daerah lainnya untuk peningkatan PAD. Selain itu juga, dilaksanakan melalui optimalisasi penggunaan keuangan daerah yang proporsional, efisien dan efektif oleh SKPD dengan melibatkan private sektor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikatornya meningkatnya kontribusi pendapatan dari pemanfaatan kekayaan dan aset daerah 30 % serta kontribusi pendapatan perusahaan daerah terhadap PAD 30 %.

3. Pembangunan Industri dan Perdagangan

- Pembangunan industri di Kabupaten Ciamis diprioritaskan pada pemantapan industri rumah tangga dan industri kecil dan menengah terutama yang mengolah hasil pertanian dan kehutanan melalui pemantapan fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha industri, pemantapan kelembagaan, penguatan produk unggulan industri yang berkualitas yang memenuhi sertifikasi untuk mendukung tumbuhnya industri baru, serta pemantapan jaringan kerjasama (*networking*) antara pengusaha dengan berbagai tingkatan.

Indikator pembangunan industri dan perdagangan yaitu meningkatnya investasi industri 18 %, dan meningkatnya industri yang berkualitas yang didukung sertifikasi (HAKI).

- Pembangunan perdagangan diprioritaskan pada pemantapan pelaku usaha perdagangan serta untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah. Sedangkan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi diupayakan pada pemantapan manajemen kelembagaan usaha.

Indikator pembangunan perdagangan ditandai dengan berkembang pelaku usaha perdagangan 45 %, meningkatnya distribusi barang dan jasa khususnya kebutuhan pokok masyarakat.

- Pembangunan industri dan perdagangan daerah juga diprioritaskan pada pemantapan promosi dan kerja sama investasi yang dijalankan secara sinergis antar pelaku usaha lokal dan regional melalui pemanfaatan dan pengaturan pasar regional, optimalisasi kelembagaan dan jaringan kemitraan usaha, penguatan sertifikasi produk daerah, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri menengah dan industri besar serta peningkatan dan pengembangan ekspor.

4. Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

- Pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan pada penguatan pemantapan peningkatan infrastruktur wilayah yang dapat menghubungkan simpul-simpul kegiatan ekonomi produksi dengan tingkat aksesibilitas yang cepat, aman, dan menarik investasi, pelayanan mobilitas penduduk, fasilitas layanan publik lainnya, serta kesejahteraan masyarakat melalui penguatan dan pemantapan revitalisasi, revitalisasi, rehabilitasi, dan peningkatan sarana infrastruktur yang telah ada serta pembangunan infrastruktur baru yang disesuaikan dengan dinamika kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pembangunan transportasi diprioritaskan pada pemantapan pengelolaan jaringan transportasi yang menunjang peningkatan akses terhadap simpul-simpul kegiatan

ekonomi produksi dan pengembangan wilayah melalui peningkatan kualitas/status 75 % jalan dan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur transportasi darat, pengembangan pelabuhan laut, persiapan infrastruktur transportasi udara.

- Pembangunan irigasi diprioritaskan pada pemantapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan melalui pemantapan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, serta pengendalian dan normalisasi sungai yang handal dalam menanggulangi banjir dan kekeringan yang ditandai cakupan layanan irigasi teknis 90 % luas lahan sawah.

Pembangunan air bersih diprioritaskan pada pemantapan perluasan penyediaan air minum bagi masyarakat melalui pemantapan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum, menjaga kelestarian sumber air baku, pengendalian limbah dan sanitasi lingkungan.

- Pembangunan ketenagalistrikan dan telekomunikasi diprioritaskan pada pemantapan perluasan dan pemerataan layanan ketenagalistrikan dan telekomunikasi, penguatan pengembangan energi terbarukan penguatan fasilitas ketenagalistrikan, serta penguatan telekomunikasi untuk kepentingan publik dan ekonomi masyarakat, khususnya di perdesaan dan wilayah pesisir yang mendukung pemantapan pengembangan *e-government*. Pembangunan ketenagalistrikan ditandai dengan pembangunan jaringan listrik 200 km (21,8 %) dan pemanfaatan energi tenaga listrik yang terbarukan dan ramah lingkungan
- Pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup tetap diarahkan agar pemanfaatan sumberdaya alam memperhatikan aspek- aspek kelestariannya dan pemantapan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dilaksanakan lebih intensif dan terintegrasi untuk mengendalikan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pelaku – pelaku usaha pertambangan/galian dapat terbina dengan baik dengan cakupan minimal 70% dari jumlah pelaku usaha, hutan negara terjamin kelestariannya, lahan pertanian dimanfaatkan sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air, lahan kritis menjadi lahan produktif dengan pengelolaan yang intensif, serta pengembangan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

Gerakan penanaman pohon dalam rangka penghijauan tetap dilaksanakan dan menjadi gerakan swadaya masyarakat dengan menggunakan bibit yang berkualitas/unggul untuk mencapai penutupan lahan bervegetasi tetap minimal 32% dari luas wilayah. Selanjutnya pemasyarakatan sumur resapan terus digalakan dengan capaian target minimal 60% dari kebutuhan sumur resapan dapat terpenuhi. Pada daerah-daerah tertentu yang memenuhi syarat, pembuatan Check Dam, embung dan Dam Penahan tetap dilanjutkan dalam rangka pengendalian lumpur dan konservasi air. Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada sungai di luar Kota Ciamis yang telah terindikasi menimbulkan pencemaran yang berat melalui Program Kali Bersih, pengendalian pencemaran industri dengan cakupan minimal 40% industri dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sistem pelayanan persampahan ditingkatkan dengan cakupan pelayanan meliputi 12 Kota Kecamatan dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan yang sudah ada. Pembuatan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) bagi rumah tangga ditingkatkan dengan cakupan minimal 50% dari kebutuhan.

- Penataan ruang diprioritaskan pada pemantapan pengembangan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau, pemantapan perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, perencanaan penataan ruang, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang, penegakan peraturan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pemetaan kawasan rawan bencana, pengembangan perumahan dan pemukiman, lingkungan

sehat perumahan, serta perbaikan perumahan akibat bencana alam, peningkatan kesiagaan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran, banjir, dan gerakan tanah.

5. Pembangunan Pemerintahan

- Pembangunan politik dan demokrasi diprioritaskan pada pemantapan perbaikan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi, penataan mekanisme demokrasi, dan perbaikan budaya dan perilaku demokrasi, serta pemantapan perluasan kesempatan partisipasi politik.
- Pembangunan hukum diprioritaskan pada pemantapan harmonisasi dan penyelarasan penegakan hukum dan kualitas produk hukum dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui sosialisasi bidang hukum untuk mengembangkan kesadaran hukum agar masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum. pemantapan pelayanan hukum dan pelayanan publik yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap warga melalui pengembangan pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat kurang mampu, pemantapan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya alam, serta penguatan produk hukum yang mencerminkan keberpihakan kepada rakyat untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- Pembangunan aparatur diprioritaskan pada pemantapan kualitas, kuantitas, dan kompetensi sumber daya aparatur melalui rekrutmen dan penetapan pegawai yang disesuaikan dengan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemantapan efektifitas pengawasan aparatur daerah serta koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat, pemantapan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja, pemantapan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab dengan standar yang teruji.

Dengan indikator meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan sumberdaya aparatur 65 % S1.

- Pembangunan Pemerintahan desa/kelurahan diprioritaskan pada pemantapan kemampuan pemerintahan desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang didukung oleh peran aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial di perdesaan, dan pembangunan infrastruktur perdesaan. Pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan sebagai kawasan pengembangan wilayah.

4.3.5. RPJMD Kelima (2024-2025)

RPJMD kelima diarahkan pada upaya mempertahankan keunggulan dan keberlanjutan hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahap sebelumnya untuk mempertahankan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis.

Prioritas pembangunan pada tahap ini sebagian besar merupakan kelanjutan hasil-hasil pembangunan pada tahap sebelumnya yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Pembangunan tahap kelima ini akan berhubungan dengan perubahan RPJP tahun 2025 serta evaluasi pembangunan Kabupaten Ciamis dalam satu rentang pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, pada tahap transisi pembangunan jangka panjang ini terdapat prioritas pembangunan yang dilakukan.

1. Pembangunan Kependudukan, Agama, dan Sosial Budaya

- Pembangunan kependudukan diprioritaskan pada mempertahankan keunggulan keseimbangan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian pertumbuhan penduduk alamiah dan migrasi kependudukan yang didukung dengan mempertahankan penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) mencapai 2.04, pendewasaan

usia perkawinan pertama pada usia 21 tahun, pemantapan pencapaian KB aktif Pasangan Usia Subur (PUS) dan KB Mandiri, serta mewujudkan keluarga sejahtera yang mandiri.

Peningkatan pemanfaatan sistem administrasi kependudukan sebagai basis dalam pelayanan publik dan penanganan masalah social-ekonomi masyarakat.

- Pembangunan keagamaan diprioritaskan melalui melanjutkan pemantapan peran lembaga pendidikan keagamaan, peningkatan peran organisasi keagamaan dalam mempertahankan harmonisasi antar kelompok masyarakat dan mempertahankan perilaku toleransi terhadap keragaman agama sebagai modal dasar implementasi pembangunan.
- Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada penuntasan pendidikan dasar 12 tahun serta mempertahankan keunggulan pendidikan kejuruan yang disesuaikan dengan potensi daerah dan pasar tenaga kerja dan rintisan program pendidikan tinggi melalui pemantapan pelayanan pendidikan, peningkatan manajemen pelayanan, sarana dan prasarana pendidikan, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, serta penyempurnaan kurikulum yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi dan potensi yang dimiliki serta pemantapan kemitraan dengan pendidikan tinggi di daerah dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Indikator keberhasilan ini adalah pencapaian RLS sebesar 8,50 dan pencapaian AMH sebesar 99,95%.

- Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada pemantapan keunggulan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan situasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan yang didukung dengan pemantapan strategi program bidang kesehatan yang sesuai dengan dinamika kependudukan, perkembangan epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, serta mempertahankan pemantapan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat.

Indikator keberhasilan adalah AKI 10 orang, AKB 22,17 0/00, dan AHH 70,40 Tahun

- Pemberdayaan masyarakat diprioritaskan pada menurunkan jumlah rumah tangga miskin melalui pemantapan keunggulan ekonomi masyarakat, pemantapan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam sebagai modal pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pemantapan keunggulan kualitas sumberdaya manusia dalam mempertahankan kemandirian, kreatifitas prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dengan indikator keberhasilan : mewujudkan keluarga sejahtera dan mandiri, pengembangan kader pemberdayaan masyarakat yang terlatih sebanyak 20 orang per desa.

- Pembangunan kesejahteraan diprioritaskan pada mempertahankan kemandirian peningkatan aksesibilitas masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelompok rentan lainnya melalui mempertahankan upaya pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin dan pemantapan akses terhadap bantuan jaminan dan pelayanan sosial dasar lainnya dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri yang ditandai : pelayanan rehabilitasi, jaminan sosial, serta pelayanan sosial dasar lainnya yang merata, serta pemantapan kualitas hidup dan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan, terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan anak, kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, sehingga terwujudnya masyarakat yang maju dan mandiri.
- Pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada untuk mempertahankan keunggulan budaya dan sistem sosial yang dimiliki melalui penguatan daya tahan budaya daerah dan nilai-nilai sosial terhadap pengaruh global untuk menguatkan kepribadian pemerintah dan masyarakat. Mempertahankan pengembangan nilai

budaya dilaksanakan melalui optimalisasi pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta optimalisasi pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

- Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan diprioritaskan pada pengembangan lembaga-lembaga kepemudaan dalam pembangunan dan pemantapan prestasi olah raga daerah melalui pembinaan organisasi kepemudaan, atlet daerah yang profesional, pemberdayaan pemuda sebagai pelopor dalam bidang ekonomi dan pendidikan.
- Pembangunan ketenagakerjaan diprioritaskan untuk mempertahankan penguatan kemampuan dan keterampilan pencari kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan diberbagai sektor kegiatan ekonomi penduduk dan perkembangan IPTEKS melalui pengembangan lapangan pekerjaan dan pemantapan penguatan aksesibilitas terhadap lembaga-lembaga pelatihan, penyalur tenaga kerja, dan penguatan hubungan koordinasi dengan daerah lain (regional maupun nasional) dalam perluasan lapangan pekerjaan, serta memfasilitasi peningkatan standar kesejahteraan pekerja.

2. Pembangunan Perekonomian Daerah

- Pembangunan perekonomian daerah diprioritaskan untuk mempertahankan pemantapan produktivitas daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) berkualitas, tinggi dan pemerataan PDRB perkapita, semakin menguatnya kemampuan daya beli masyarakat.
- Mempertahankan daya saing daerah: mempertahankan kualitas komoditi unggulan daerah, mewujudkan kemandirian kelompok ekonomi produktif dan koperasi, mempertahankan iklim berusaha dan investasi pemantapan iklim investasi dengan promosi investasi dan pemantapan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung investasi, serta meningkatnya jumlah investasi.

Indikator capaian LPE 7.7 %, PDRB perkapita Rp. 14.200.000,-

- Pembangunan pertanian diprioritaskan untuk mempertahankan keunggulan agribisnis yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, pasca panen dan pemasaran hasil pertanian yang melalui pemantapan peningkatan infrastruktur pendukung, penguasaan pasar yang luas, optimalisasi mekanisasi dan diversifikasi pertanian, optimalisasi mutu produksi pertanian (yang meliputi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan produk pertanian) untuk merespon permintaan konsumen, penguatan keunggulan rekayasa teknologi dan mekanisasi pertanian yang dilaksanakan dengan cara terpadu dan terintegritas dari mulai tanam sampai dengan pasca panen, mempertahankan swasembada beras, keunggulan industri hasil pertanian (pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan), serta mempertahankan keunggulan industri perikanan tangkap dan budidaya perikanan.

Upaya tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah komoditi unggulan 30 %, meningkatnya produksi komoditi unggulan 30 %, meningkatnya surplus beras 44 %, meningkatnya pangsa pasar ekspor, serta meningkatnya optimalisasi penggunaan lahan pertanian.

Pembangunan kelautan diprioritaskan untuk mempertahankan optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan melalui memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kelautan, peningkatan penggunaan teknologi dan rekayasa teknologi dalam pengembangan penanganan pasca panen, memperluas jaringan pemasaran hasil tangkapan, serta pelestarian sumberdaya kelautan melalui pengembangan partisipasi masyarakat.

- Pembangunan pariwisata diprioritaskan untuk mempertahankan keunggulan ekowisata, agrowisata, wisata budaya, dan jasa lingkungan serta menggali sumberdaya wisata lain yang berdaya jual, diminati untuk dikunjungi dengan

memperhatikan konservasi wilayah laut, gunung, dan hutan dan ramah lingkungan dan ramah budaya.

Indikator pengembangan kepariwisataan ditandai dengan meningkatnya arus kunjungan wisata domestik dan wisatawan mancanegara, lama tinggal wisatawan selama 3 serta tumbuhnya akomodasi wisata 35 %, meningkatnya obyek dan atraksi wisata unggulan sebanyak 4 objek wisata %.

- Pengelolaan keuangan daerah diprioritaskan untuk mempertahankan peningkatan keuangan daerah melalui pemantapan kemampuan daya guna kekayaan, aset dan perusahaan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan peluang-peluang sumber pendapatan daerah untuk dalam peningkatan PAD. Selain itu juga, dilaksanakan melalui optimalisasi penggunaan keuangan daerah yang proporsional, efisien dan efektif oleh SKPD dengan melibatkan private sektor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikatornya meningkatnya kontribusi pendapatan dari pemanfaatan kekayaan dan aset daerah 40 % serta kontribusi pendapatan perusahaan daerah terhadap PAD 40 %.

3. Pembangunan Industri dan Perdagangan

- Pembangunan industri di Kabupaten Ciamis diprioritaskan pada pemantapan industri rumah tangga dan industri kecil dan menengah terutama yang mengolah hasil pertanian dan kehutanan melalui pemantapan fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha industri, pemantapan kelembagaan, penguatan produk unggulan industri yang berkualitas yang memenuhi sertifikasi untuk mendukung tumbuhnya industri baru serta mempertahankan jaringan kerjasama (networking) antara pengusaha dengan berbagai tingkatan yang mendukung iklim investasi .

Indikator pembangunan industri dan perdagangan yaitu meningkatnya investasi industri 7 %, dan meningkatnya industri yang berkualitas yang didukung sertifikasi (HAKI).

- Pembangunan perdagangan diprioritaskan untuk mempertahankan pemantapan pelaku usaha perdagangan serta untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah. Sedangkan pengembangan Usaha Mikro Kecil menengah dan koperasi diupayakan pada pemantapan manajemen kelembagaan usaha.

Indikator pembangunan perdagangan ditandai dengan berkembang pelaku usaha perdagangan 16 %, meningkatnya distribusi barang dan jasa khususnya kebutuhan pokok masyarakat.

- Pengembangan industri dan perdagangan daerah juga diprioritaskan untuk mempertahankan pemantapan promosi dan kerja sama investasi yang dijalankan secara sinergis antar pelaku usaha lokal dan regional melalui pemanfaatan dan pengaturan pasar regional, optimalisasi kelembagaan dan jaringan kemitraan usaha, penguatan sertifikasi produk daerah, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri menengah dan industri besar serta peningkatan dan pengembangan ekspor.

4. Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

- Pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan untuk mempertahankan pemantapan pemanfaatan infrastruktur wilayah wilayah yang dapat menghubungkan simpul-simpul kegiatan ekonomi produksi dengan tingkat aksesibilitas yang cepat, aman, dan menarik investasi, pelayanan mobilitas penduduk dan kesejahteraan masyarakat melalui mempertahankan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pemantapan revitalisasi, rehabilitasi dan peningkatan sarana infrastruktur yang telah ada serta pembangunan infrastruktur baru yang disesuaikan dengan dinamika kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pembangunan transportasi diprioritaskan pada upaya melanjutkan pengelolaan jaringan transportasi yang menunjang peningkatan akses terhadap simpul-simpul kegiatan ekonomi produksi dan pengembangan wilayah yang handal dan terintegritas melalui peningkatan status jalan dan jembatan, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur transportasi darat, laut dan melanjutkan persiapan infrastruktur transportasi udara.

- Pembangunan irigasi diprioritaskan pada pemantapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan melalui pemantapan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, serta pengendalian dan normalisasi sungai yang handal dalam menanggulangi banjir dan kekeringan.
- Pembangunan air bersih diprioritaskan pada pemantapan perluasan penyediaan air minum bagi masyarakat melalui pemantapan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum dengan tetap
- Pembangunan ketenagalistrikan dan telekomunikasi diprioritaskan pada pemantapan perluasan dan pemerataan layanan ketenagalistrikan dan telekomunikasi, penguatan pengembangan energi terbarukan penguatan fasilitas dan komunikasi untuk kepentingan publik ekonomi masyarakat, khususnya di perdesaan dan wilayah pesisir serta pemantapan pengembangan *e-government* yang pembangunan jaringan listrik 165 km (18 %), dan cakupan layanan irigasi teknis 100 % luas lahan sawah.
- Pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap terjaminnya kelestarian sumberdaya alam dan memantapkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk memantapkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumberdaya alam diprioritaskan pada pemberdayaan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pelaku – pelaku usaha galian/tambang semakin tertib dan terbina dengan baik dengan capaian target minimal 75% dari jumlah pelaku usaha, hutan dan lahan terjamin kelestariannya, gerakan penanaman pohon telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi andalan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah. Jumlah areal bervegetasi tetap diharapkan mencapai minimal 35% dari luas wilayah, sumbu resapan air hujan mencapai minimal 75% dari kebutuhan serta pengembangan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan..

Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan untuk melanjutkan Program Kali Bersih periode sebelumnya, pengendalian pencemaran industri mencapai cakupan minimal 50% industri dilengkapi IPAL, kualitas pelayanan persampahan meningkat, dan limbah cair rumah tangga tertangani dengan baik dengan cakupan minimal 60%. Kualitas lingkungan hidup yang semakin baik ditandai dengan terkendalinya erosi dan sedimentasi, keseimbangan tata air yang semakin terjamin, serta terkendalinya pencemaran lingkungan.

- Penataan ruang diprioritaskan untuk mempertahankan konsistensi pengembangan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, perencanaan penataan ruang, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang, penegakan peraturan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pemetaan kawasan rawan bencana, pengembangan perumahan, lingkungan sehat perumahan, perbaikan perumahan akibat bencana alam dan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

5. Pembangunan Pemerintahan

- Pembangunan politik dan demokrasi diprioritaskan pada pemantapan pemahaman politik dan pendidikan demokrasi masyarakat yang berimplikasi pada kesinambungan pembangunan daerah.

- Pembangunan hukum diprioritaskan pada pemantapan harmonisasi dan penyelarasan penegakan hukum dan kualitas produk hukum dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui memantapkan sosialisasi bidang hukum untuk memantapkan kesadaran hukum agar masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum. Selain itu dalam pemantapan pelayanan hukum dan pelayanan publik ditandai dengan terpenuhinya rasa keadilan bagi setiap warga melalui pemantapan pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat kurang mampu, pemantapan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya alam, serta penguatan produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- Pembangunan aparatur diprioritaskan untuk mempertahankan keunggulan kualitas, kuantitas, kompetensi sumber daya aparatur melalui pemantapan rekrutmen dan penetapan pegawai yang disesuaikan dengan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemantapan efektifitas pengawasan aparatur daerah serta koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat, pemantapan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja, pemantapan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab dengan standar yang teruji, serta mampu bersinergi dengan stakeholders lainnya.
- Pembangunan pemerintahan desa/kelurahan diprioritaskan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan dan desa transisi sebagai sebagai pusat-pusat pengembangan kawasan yang didukung dengan peran aktif masyarakat desa pengelolaan dan pemanfaatan keunggulan kawasan.

Indikator pembangunan bidang ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat hingga pemerintahan desa/kelurahan, dan kualitas pendidikan sumber Daya aparatur 70% berkelayakan.

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun ke depan yang memuat visi, misi, arah, sasaran pokok dan tahapan pembangunan berdasarkan pendekatan bidang pembangunan daerah, dan merupakan pedoman bagi seluruh kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 diharapkan dapat dijadikan sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Visi, Misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis, Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja SKPD, dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sekaligus sebagai acuan dalam memberikan arah bagi penentuan kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Ciamis.
2. Media untuk mensinergikan arah, sasaran, dan tahapan dalam perencanaan pembangunan dan pembagian sentra wilayah pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya keberhasilan dalam pelaksanaan RPJPD mempunyai hubungan sangat erat dengan komitmen penyelenggara pemerintahan daerah, para pemangku kepentingan, dan seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. DEDI SOBANDI

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H.D. HIDAYAT K.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2009 NOMOR